

**INKONSISTENSI POLANDIA DALAM MERESPONS  
KRISIS PENGUNGANSI DI EROPA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang  
Hubungan Internasional**



**Oleh:**  
**BRIAN RIZKY BIMANTARA**  
**NIM. I92214016**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JULI 2018**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Brian Rizky Bimantara

NIM : I92214016

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : *Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 12 Juli 2018

Yang menyatakan



**Brian Rizky Bimantara**

NIM: I92214016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Brian Rizky Bimantara

NIM : I92214016

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: “**Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa**”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing



M. Fathoni Hakim, M.Si

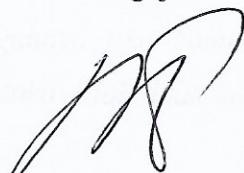
NIP: 198401052011011008

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Brian Rizky Bimantara dengan judul: “**Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 24 Juli 2018.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



M. Fathoni Hakim, M.Si  
NIP. 198401052011011008

Penguji II



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., MA.  
NIP. 198408232015031002

Penguji III



Zaky Ismail, M.S.I  
NIP. 198212302011011007

Penguji IV



Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197706232007101006

Surabaya, 24 Juli 2018

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. A.R. Muzaeki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.  
NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Brian Rizky Bimantara  
NIM : I92214016  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Hubungan Internasional  
E-mail address : bryan.uinsa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis,

(Brian Rizky Bimantara)

## ABSTRAK

**Brian Rizky Bimantara, 2018, Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa**, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci:** Polandia, European Refugee Crisis, Europeanization, Pengungsi

Penelitian ini berusaha menjelaskan alasan inkonsistensi Polandia dalam mengimplementasikan *European Refugee Relocation Plan* sebagai respons terhadap krisis pengungsi di Eropa. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan teori konstruktivisme, inkonsistensi yang dilakukan oleh Polandia didasari oleh identitas yang dimilikinya yakni: 1) Polandia sebagai pelindung Eropa dan Kristen; 2) Polandia adalah negara yang homogen baik etnis dan agama; 3) Norma dan nilai Polandia tidak sepenuhnya sama dengan yang dianut oleh Uni Eropa. Peneliti kemudian berusaha menjelaskan proses sekuritisasi isu pengungsi tersebut dengan teori sekuritisasi yang menunjukkan bahwa elit politik Polandia berusaha membenturkan identitas pengungsi dengan masyarakat Polandia guna menunjukkan bahwa pengungsi tersebut adalah ancaman yang harus dihindari. Dengan konsep Eropanisasi, peneliti kemudian melengkapi alasan inkonsistensi Polandia dari sisi integrasi politik Uni Eropa yakni ketidaaan *facilitating factor* di Polandia yang menyebabkan tidak terimplementasinya *European Refugee Relocation Plan* sebagai respons terhadap krisis pengungsi di Eropa.

## ABSTRACT

**Brian Rizky Bimantara, 2018, Poland's Inconsistency in Responding European Refugee Crisis**, Undergraduate Thesis Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

**Keywords:** Poland, European Refugee Crisis, Europeanization, Refugees

This research seeks to explain the reasons for Poland's inconsistency in implementing the European Refugee Relocation Plan in response to the European refugee crisis. The method used is qualitative with documentation as a data collection technique. Based on the theory of constructivism, the inconsistency committed by Poland is based on its own identity such as: 1) Poland as a protector of Europe and Christianity; 2) Poland is a homogeneous country both ethnic and religious; 3) Polish norms and values are not entirely the same as those adopted by the European Union. The researcher then attempted to explain the process of securitization of the refugee issue with the theory of securitization which showed that the Polish political elite was attempting to clash refugee identity with Polish society to show that the refugees were a threat that need to be avoided. With the concept of Europeanization, the researcher then complement the reason for the Poland's inconsistency in terms of EU political integration namely the absence of a facilitating factor in Poland that causes the European Refugee Relocation Plan is not implemented in response to the European refugee crisis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI...</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Konseptual.....	13
1. Pengungsi.....	13
2. Orang Tak Berkewarganegaraan.....	14
3. Pencari Suaka.....	14
4. <i>European Union</i> .....	15
5. Krisis Pengungsi di Eropa.....	16
6. <i>European Refugee Relocation Plan</i> .....	17
G. Hipotesa .....	18
H. Sistematika Penyajian Skripsi.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	21
A. Teori Konstruktivisme .....	22
B. <i>Copenhagen School</i> dan <i>Securitization Theory</i> .....	27
C. Eropanisasi ( <i>Europeanization</i> ).....	29
1. Dampak Eropanisasi terhadap Kondisi Domestik Negara Anggota .....	30
2. <i>Facilitating Factors</i> sebagai Pendorong Perubahan Domestik .....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Waktu .....	42
C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis .....	42
D. Tahap-Tahap Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	48
A. Konstruksi Identitas dan Sejarah Polandia .....	49
B. Akses Uni Eropa terhadap Polandia .....	63
C. Pandangan Domestik Politik Polandia terhadap Nilai-Nilai Eropa ..	65
D. Inkonsistensi Polandia dan Konstruksi Ancaman dalam Merespon <i>European Refugee Crisis</i> .....	68
E. Analisis Data.....	77
1. Relasi Identitas dan Respons Polandia dalam Kerangka Strategi Kultural	78
2. Sekuritisasi Krisis Pengungsi di Eropa sebagai Pendorong Stagnasi Polandia dalam Mengimplementasikan <i>European Refugee Relocation Plan</i> .....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	98

## DAFTAR TABEL

Halaman	
Tabel 2.1 Tingkat Perubahan Domestik.....	40
Tabel 4.1 Klasifikasi Identitas Polandia .....	83
Tabel 4.2 Sekuritisasi dalam respons Polandia terhadap krisis pengungsi Eropa	89

## **DAFTAR BAGAN**

	Halaman
Bagan 2.1 Operasionalisasi Landasan Teoritik.....	21
Bagan 2.2 Proses Perubahan Domestik atas Eropanisasi.....	38
Bagan 4.1 Analisis Data.....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengkaji penyebab inkonsistensi Polandia sebagai negara anggota Uni Eropa dalam merespons krisis pengungsi di Eropa dan relasi identitas eropa yang dimiliki Polandia dalam membentuk keseragaman kebijakan terhadap krisis pengungsi di tengah ketidakpatuhannya.

Sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun 2010 telah terjadi fenomena *Arab Spring* yang memicu adanya imigrasi besar-besaran yang diyakini sebagai bibit munculnya krisis pengungsi di Eropa.<sup>1</sup> Kondisi dalam negeri negara-negara arab pada saat itu sangatlah tidak stabil dan dipenuhi dengan demo dan kerusuhan yang dilakukan oleh berbagai elemen gerakan sosial untuk menjatuhkan rezim yang ada. Hal ini tentu tidak terlepas dari konflik yang terjadi di wilayah tersebut.<sup>2</sup> Sebagaimana yang dilaporkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa perang di Suriah dan Irak sebagaimana kekerasan dan ketidakstabilan di Afghanistan dan Eritrea telah menjadi penyebab krisis tersebut. Kondisi yang tidak stabil inilah yang menyebabkan banyak sekali penduduk di negara-negara tersebut bermigrasi ke Eropa. Hal itu dikarenakan aspek kemanusiaan

<sup>1</sup> "The Arab Springs looming refugee crisis," Foreign Policy, diakses 26 Juni 2018. <http://foreignpolicy.com/2011/06/23/the-arab-springs-looming-refugee-crisis/>

<sup>2</sup> "European Refugee Crisis 2015: Why So Many People Are Fleeing The Middle East and North Africa," diakses 09 April 2018, <http://www.ibtimes.com/european-refugee-crisis-2015-why-so-many-people-are-fleeing-middle-east-north-africa-2081454>.

mereka sungguh terancam. Mereka hidup dalam penuh ancaman baik secara rohani dan jasmani. Oleh karena itu mereka milarikan diri menuju Eropa dengan harapan ketika mereka sampai di negara-negara Eropa mereka mendapatkan perlindungan dan terpenuhinya rasa aman dan nyaman sebagai manusia.

Berdasarkan *UN Refugee Agency*, perang sipil di Suriah sendiri yang telah terjadi pada tahun 2011 telah menyebabkan kurang lebih lima juta penduduknya menjadi pengungsi.<sup>3</sup> Hal ini menjadikan Suriah sebagai populasi pengungsi terbesar dari konflik tunggal sepanjang sejarah. Selain Suriah, penduduk Eritrea menjadi pengungsi yang paling banyak melarikan diri ke Eropa melalui jalur yang tidak biasa (*irregular route*). Lemahnya penegakan hak asasi manusia serta kekerasan yang terjadi di bawah otoritas pemerintah menyebabkan adanya potensi *crimes against humanity* di Eritrea sehingga penduduknya berusaha untuk melarikan diri ke Eropa.<sup>4</sup>

Kebanyakan para pengungsi memilih untuk melarikan diri ke Eropa karena ekonomi negara-negara Eropa yang relatif stabil membuat Eropa sebagai destinasi dengan peminat pengungsi lebih tinggi daripada kawasan yang lain. Sedangkan gelombang pengungsi yang terlampaui tinggi, sekitar satu juta pengungsi baru, cukup membuat beberapa negara anggota Uni Eropa kewalahan diantaranya Italia dan Yunani yang

<sup>3</sup> "Syria Emergency," diakses 09 April 2018, <http://www.unhcr.org/syria-emergency.html>.

<sup>4</sup> "European Refugee Crisis 2015: Why So Many People Are Fleeing The Middle East and North Africa," diakses 09 April 2018, <http://www.ibtimes.com/european-refugee-crisis-2015-why-so-many-people-are-fleeing-middle-east-north-africa-2081454>.

berbatasan langsung dengan rute pengungsi. Dalam kondisi yang tidak menentu dan semakin banyaknya gelombang pengungsi yang masuk membuat para pemimpin Uni Eropa berusaha untuk mencari jalan keluar bagaimana cara menangani pengungsi tersebut. Karena tentunya Yunani dan Italia tidak akan mampu untuk menangani pengungsi tersebut secara sendiri tanpa bantuan negara-negara anggota Uni Eropa.

Karena jika mengacu pada *Dublin Regulation* maka pencari suaka harus tetap tinggal di negara Eropa yang pertama kali mereka kunjungi dan negara tersebut yang bertanggung jawab untuk mengurus aplikasi suaka dari para pengungsi yang datang. Sedangkan migran yang berusaha pergi ke negara Eropa lain dapat dipastikan akan dideportasi kembali ke negara Eropa yang pertama kali mereka datangi. Oleh karena itu, jika tetap menggunakan *Dublin Regulation* dalam menghadapi gelombang pengungsi yang cukup besar maka beban tanggung jawab tidak akan terbagi secara merata.

Hingga akhirnya pada tahun 2015 Kanselir Jerman, Angela Merkel, memperingatkan bahwa masa depan Uni Eropa sangatlah berisiko jika semua negara angota Uni Eropa bekerja sama untuk melakukan distribusi pengungsi yang adil. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh *European Commision* yang mengeluarkan kebijakan relokasi pengungsi (*European Refugee Relocation Plan*) untuk menyebar pengungsi yang menumpuk di Italia dan Yunani ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.

*The European Council* setuju untuk melakukan relokasi 40.000 pengungsi dari Italia (24.000) dan Yunani (16.000). Hal ini membuat krisis pengungsi ini menjadi krisis yang terbesar di Eropa setelah Perang Dunia 2. Pada bulan September 2015, *the European Council* memutuskan untuk menambah kuota relokasi sebesar 120.000 pengungsi dari Italia dan Yunani. Akan tetapi hal tersebut berubah hingga akhirnya hanya 98.255 pengungsi yang dapat direlokasi ke negara anggota Uni Eropa berdasarkan 1) Jumlah populasi (40%); 2) Total GDP (40%); 3) Jumlah aplikasi suaka dan jumlah pengungsi yang telah menetap per 1 juta penduduk selama periode 2010-2014 (10%); 4) Tingkat pengangguran (10%).<sup>5</sup> Keputusan tersebut diadopsi sesuai dengan voting bersama. Negara yang menolak keputusan ini adalah Hungaria, Slovakia, Republik Ceko, dan Romania. Meskipun begitu mereka tetap harus mau mentaati skema relokasi ini.<sup>6</sup>

Untuk membagi beban keuangan, telah diputuskan bahwa negara anggota akan menerima 6000 Euro untuk setiap individu yang direlokasi ke negaranya. Disaat yang bersamaan, Italia dan Yunani juga akan mendapatkan 500 Euro sebagai uang transportasi pengungsi dari Italia dan Yunani ke negara relokasi. Akan tetapi Polandia yang pada awalnya setuju terhadap rencana relokasi tersebut hingga pada tahun 2017 masih belum

<sup>5</sup> Senada Selo Sabic, *The Relocation of Refugees in the European Union* (Friedrich Ebert Stiftung, 2017), 5.

<sup>6</sup> Ibid

merelokasi satu pengungsi yang berujung pada usaha Komisi Uni Eropa untuk menuntut Polandia ke ranah hukum di ECJ.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penulis menganggap hal ini menarik karena ketika Polandia, sebagai negara anggota Uni Eropa, yang pada tahun 2015 berkomitmen secara hukum untuk menerima 6.182 pengungsi, terbesar keempat setelah Jerman, Perancis, dan Spanyol, tetapi hingga tahun 2017 belum sama sekali menerima pengungsi untuk dipindahkan di Polandia. Hal ini juga menjadi menarik bagi penulis ketika berujung pada penuntutan Polandia di ECJ (*The European Court of Justice*) pada tahun 2017. Sehingga penulis menganggap signifikan untuk meneliti relasi identitas Eropa dalam mengkonstruksi Polandia untuk patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa khususnya pada isu pengungsi sesuai dengan nilai-nilai Uni Eropa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan non-diskriminasi.<sup>8</sup>

Sehingga ruang lingkup waktu yang diambil adalah tahun 2015 hingga tahun 2017 dengan rasionalisasi bahwa pada tahun 2015 *European Commission* mengeluarkan kebijakan relokasi pengungsi yang telah disetujui oleh negara anggota Uni Eropa, termasuk Polandia, untuk disebar di negara anggota Uni Eropa. Hal tersebut disebabkan karena ketidakmampuan Itali dan Yunani sebagai *point of entry* untuk menangani

<sup>7</sup> “EU to sue Poland, Hungary and Czechs for refusing refugee quotas,” diakses 11 April 2018, <http://www.bbc.com/news/world-europe-42270239>.

<sup>8</sup> “The EU in brief,” diakses 04 April 2018, [https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en)

pengungsi tersebut.<sup>9</sup> Hingga pada tahun 2017 *European Commission*, sebuah badan eksekutif Uni Eropa, menuntut Polandia di *European Court of Justice* (ECJ) karena tidak memenuhi kewajibannya dengan menolak untuk menerima *asylum seekers*.<sup>10</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

Mengapa Polandia inkonsisten dalam merespons krisis pengungsi di Eropa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

Menganalisis penyebab inkonsistensi respon Polandia dalam krisis pengungsi di Eropa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Bagi praktisi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana diagnosis dalam mencari penyebab *European refugee relocation plan* tidak diimplementasikan dengan baik oleh Polandia sehingga dapat digunakan untuk rujukan pertimbangan dalam pembuatan strategi atau kebijakan selanjutnya.

<sup>9</sup> “The EU migrant relocation and resettlement scheme – what you need to know,” diakses 04 April 2018, <http://www.dw.com/en/the-eu-migrant-relocation-and-resettlement-scheme-what-you-need-to-know/a-40378909>.

<sup>10</sup> EU to sue Poland, Hungary and Czechs for refusing refugee quotas," diakses 04 April 2018, <http://www.bbc.com/news/world-europe-42270239>.

## 2. Bagi akademisi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan bahan pertimbangan untuk menambah wawasan terutama bagi yang berminat meneliti topik terkait identitas Eropa.

### 3. Bagi peneliti

Sebagai langkah konkret penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini didapat peneliti selama menempuh pendidikan sarjana.

## E. Tinjauan Pustaka

Peran identitas dalam suatu objek menjadi sangat penting ketika dapat mempengaruhi objek lain secara signifikan, baik karakteristik maupun kinerjanya. Tak terkecuali pada lingkup dunia internasional, dimana identitas yang dimiliki oleh suatu organisasi regional menjadi sangat penting dalam mempengaruhi negara-negara anggotanya. Identitas organisasi regional menjadi salah satu faktor yang sangat memberikan implikasi negara anggotanya dalam melakukan sesuatu ataupun mengeluarkan kebijakan yang telah dipadu-padankan dengan orientasi organisasi tersebut sehingga organisasi tersebut secara tidak langsung akan dapat mengimplementasikan visi-misinya melalui negara anggota. Tidak hanya dari segi organisasi saja, negara anggota pun juga turut merealisasikan visi-misi organisasi yang telah masuk dalam identitas itu dan mengadopsinya untuk diterapkan di dalam negeri. Hal inilah yang mengakibatkan beberapa perubahan yang dihasilkan dari negara-negara dimana sebelumnya tidak bergabung pada salah satu organisasi regional,

belum menjalankan program apapun yang dicanangkan organisasi. Namun, berbeda jika setelah kemudian bergabung dengan organisasi, secara otomatis sedikit banyaknya akan mulai menerapkan beberapa fungsi yang telah dibuat oleh organisasi demi mewujudkan kepentingan bersama di lingkup regional.

Krisis Pengungsi di Eropa telah menjadi isu keamanan yang sangat hangat dalam dunia internasional. Dengan atas nama kemanusiaan, krisis pengungsi telah mendapatkan perhatian masyarakat dunia agar menjadi isu keamanan prioritas utama yang harus diselesaikan. Kesuksesan krisis ini untuk mendapatkan perhatian dunia internasional tentunya tidak lepas dari bagaimana peran organisasi regional dalam merespon isu ini. Hal ini tentu kembali pada identitas organisasi regional, khususnya Uni Eropa, dalam usahanya untuk menerima pengungsi yang berasal dari negara timur tengah dan afrika khususnya bagi negara-negara yang enggan menerima relokasi pengungsi yakni Polandia sebagaimana disebutkan oleh Dimitris Avramopoulos, *the European Commissioner for migration*, menyatakan bahwa

*“This cannot be the responsibility of just a few member states – this must be shared by all,” he added. “It cannot be that while the majority of member states are making real efforts in a real European spirit, others continue to show no solidarity.”<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup> “EU plan to relocate 160.000 refugees from Italy and Greece by September failing despite record deaths at sea,” diakses 04 April 2018, <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-refugee-quotas-160000-italy-greece-failing-european-commissioner-legal-cases-obligations-a7739396.html>.

Berdasarkan literatur yang tersedia, terdapat keterkaitan antara identitas Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya dalam merespons krisis pengungsi di Eropa, yang dapat dikategorikan menjadi tiga macam.

Kategori pertama mengatakan bahwa dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi regional, negara anggota dalam mengeluarkan kebijakannya dipengaruhi oleh psikologi pemimpin dan politik domestik negara tersebut.<sup>12</sup> Kategori kedua mengatakan bahwa Uni Eropa memiliki agensi khusus guna mengatur menangani masalah perbatasan negara terkait krisis pengungsi di Eropa.<sup>13</sup> Kategori ketiga mengatakan bahwa terdapat aksi dan reaksi antara organisasi regional dan negara anggota yang dapat dilihat melalui wacana yang dilontarkan oleh otoritas baik organisasi regional maupun negara anggota dalam menyekuritisasi maupun mendesekuritisasi isu.<sup>14</sup> Kategori keempat mengungkapkan bahwa selalu terdapat respon yang beragam dari negara anggota terhadap organisasi supranasional. Keragaman respon tersebut diakibatkan karena partisipasi rakyat yang aktif terhadap transfer kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap negara anggotanya.

Pada kategori pertama, penelitian yang ditulis oleh Muzalevskaya menjelaskan perbedaan respons yang diambil oleh Angela Merkel dan Francois Hollande dalam menghadapi krisis pengungsi eropa. Penelitian

<sup>12</sup> Maria Muzalevskaya, "Europe's Refugee Crisis: A comparative Analysis of Germany and France" (Thesis Master, Boston University, 2016)

<sup>13</sup> Alexandra Pommer, "Frontex's Sea Operations: between Security and Human Rights" (Skripsi, University of Twente dan University of Munster, 2015)

<sup>14</sup> Laura Martines Carreno, "The Securitization of Migration in the European Union during 2015 An analysis of the discourse in Germany, Hungary, and the Czech Republic" (Thesis Master, Charles University in Prague, 2016)

ini dilakukan atas dasar kehati-hatian Hollande dalam penerimaan pengungsi yang berbeda dengan Merkel dimana ia memiliki peran aktif dalam mengatasi krisis secara intensif. Sehingga penelitian ini berusaha menjelaskan kebijakan Jerman dan Perancis melalui analisis psikologi pemimpin dan politik domestik yang ada pada saat itu. Secara spesifik, Muzalevskaya menjelaskan peran partai sayap kanan (*far right party*) dalam mempengaruhi kebijakan masing-masing negara terkait *Europeaan refugee crisis*. Argumen yang dimunculkan dalam posisi ini bahwa dalam mengeluarkan sebuah kebijakan, Angela Merkel dipengaruhi oleh preferensi pribadinya sedangkan Francois Hollande terkendala oleh oposisi domestik dalam menghadapi partai *National Front* dan jatuhnya figure legitimasi yang dimilikinya.<sup>15</sup> Berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh Muzalevskaya, dalam hal ini, saya sebagai peneliti berusaha menganalisis krisis pengungsi eropa dengan menggunakan subyek penelitian yang berbeda yakni Polandia. Secara identitas, Polandia memiliki perbedaan yang mendasar dengan Perancis dan Jerman. Karena Polandia merupakan negara yang terletak di Eropa Timur sedangkan Jerman dan Perancis terletak di Eropa Barat.

Pada kategori kedua, penelitian yang ditulis oleh Pommer menjelaskan bahwa sebuah organisasi regional, dalam hal ini adalah Uni Eropa, memiliki agensi khusus guna mengatur menangani masalah keamanan Bersama. Masalah tersebut lebih banyak terjadi di perbatasan

---

<sup>15</sup> Maria Muzalevskaya, “Europe’s Refugee Crisis: A comparative Analysis of Germany and France” (Thesis Master, Boston University, 2016)

negara terkait krisis pengungsi di Eropa. Pommer berusaha menjelaskan bagaimana performa Frontex mengamankan perbatasan negara-negara anggota Uni Eropa sebagaimana meningkatnya permintaan *asylum seeker application* dari para pengungsi. Kaitannya dalam hal ini, saya sebagai peneliti akan menjadikan Frontex sebagai contoh konkret bagaimana Uni Eropa cukup serius dalam menangani masalah keamanan bersama terutama keamanan regional.<sup>16</sup>

Pada kategori ketiga, penelitian yang ditulis oleh Carreno menjelaskan bahwa respons negara anggota Uni Eropa, dalam hal ini adalah Jerman, Hungaria, dan Republik Ceko, berbeda terhadap kebijakan Uni Eropa mengenai krisis pengungsi di Eropa. Respons yang berbeda tersebut dapat dilihat melalui wacana (*discourse*) yang diungkapkan oleh otoritas dari masing-masing negara. Dalam hal ini Jerman tampak menjadikan krisis pengungsi di Eropa adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Hal tersebut terlihat dari bagaimana keterlibatan aktif Angela Merkel dalam membawa isu ini ke Uni Eropa dan publik Eropa secara luas berdasarkan nilai solidaritas Eropa sedangkan Hungaria dan Republik Ceko terlihat enggan untuk menjadikan krisis ini sebagai masalah yang harus ditangani bersama oleh negara anggota Uni Eropa karena isu tersebut adalah sebuah ancaman yang dapat memberikan pengaruh negatif di negaranya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana otoritas kedua negara tersebut menggambarkan migrasi adalah

<sup>16</sup> Alexandra Pommer, "Frontex's Sea Operations: between Security and Human Rights" (Skripsi, University of Twente dan University of Munster, 2015)

sebuah ancaman yang potensial bagi identitas dan stabilitas ekonomi negaranya. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Carreno dan peneliti adalah subyek penelitiannya. Peneliti memilih negara anggota Uni Eropa lain yakni Polandia sebagai subyek penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa Polandia sangat inkonsisten dalam merespon krisis pengungsi di Eropa ini.<sup>17</sup>

Pada kategori keempat, yang ditulis oleh Jose Angel Risco Oliva, menjelaskan bahwa negara Uni Eropa dalam hal ini Spanyol memiliki respon yang beragam terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Wacana yang muncul ke permukaan publik terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut membutuhkan transformasi dalam perkembangan hubungan antara pemerintah negara Spanyol dengan masyarakatnya guna mengimplementasi kebijakan yang ditetapkan Uni Eropa serta merepresentasikan kepentingan semua negara anggota Uni Eropa. Hal tersebut ditunjukkan pada munculnya *Conferencial Sectoriales* yang merupakan badan kerjasama multilateral yang beroperasi secara spesifik dalam sektor aktivitas publik.<sup>18</sup> *Conferencial Sectoriales* terdiri dari beberapa kementerian yang bertanggung jawab terhadap subyek yang sama. Hal ini menguatkan argumen bahwa negara anggota akan menyesuaikan kebijakan dalam negeri nya akibat adanya proses

---

<sup>17</sup> Laura Martines Carreno, "The Securitization of Migration in the European Union during 2015 An analysis of the discourse in Germany, Hungary, and the Czech Republic" (Thesis Master, Charles University in Prague, 2016)

<sup>18</sup> Jose Angel Risco Oliva, "Regional Powers and Europeanization process in Spain," *asociace pro mezinárodní otázky* (2006): 20, <https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2015/11/amocz-RP-2006-11.pdf>

Eropanisasi yang berusaha menyeragamkan hukum dan peraturan negara anggota Uni Eropa.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Oliva dengan peneliti adalah lebih kepada obyek penelitiannya. Berangkat dari penjelasan respon Spanyol terhadap fenomena Eropanisasi yang muncul akibat penyeragaman kebijakan oleh Uni Eropa membuat peneliti tertarik untuk meneliti inkonsistensi Polandia dalam merespon *European refugee relocation plan* yang juga merupakan salah satu bentuk penyeragaman kebijakan oleh Uni Eropa serta merupakan irisan fenomena Eropanisasi.

#### **F. Kerangka Konseptual**

## 1. Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang yang dalam keadaan terpaksa untuk melarikan diri dari negaranya karena persekusi, penganiayaan, perang, atau kekerasan. Seorang pengungsi memiliki ketakutan atas persekusi dengan alasan ras, agama, kebangsaan, politik atau keanggotaan sebuah kelompok sosial. Kebanyakan dari mereka tidak dapat kembali pulang ke negara asalnya bahkan takut untuk kembali ke rumahnya. Kekerasan perang dan etnis, suku, dan agama adalah penyebab utama pengungsi melarikan diri dari negara mereka. Hampir dari sebagian

<sup>19</sup> “Sectorial Conferences,” Ministerio de Politica Teritorial y Funcion Publica, diakses 06 Juli 2018,[http://www.seat.mpr.gob.es/en/portal/areas/politica\\_autonomica/coop\\_autonomica/Conf\\_Sectoriales.html](http://www.seat.mpr.gob.es/en/portal/areas/politica_autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales.html)

pengungsi di dunia berasal dari tiga negara, antara lain: 1) Syria; 2) Afghanistan; dan 3) Sudan Selatan.<sup>20</sup>

Berdasarkan UNHCR definisi pengungsi adalah sebagai berikut,

*“Refugees include individuals recognized under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, its 1967 Protocol, the 1969 Organization of African Unity (OAU) Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, those recognized in accordance with the UNHCR Statute, individuals granted complementary forms of protection, and those enjoying temporary protection. The refugee population also includes persons in refugee-like situations.”<sup>21</sup>*

## **2. Orang tak berkewarganegaraan**

Orang tak berkewarganegaraan atau *Stateless person* adalah seseorang yang bukan warga negara dari negara manapun. Seseorang dapat menjadi *stateless* dikarenakan beberapa alasan termasuk keputusan kedaulatan, hukum, teknis, maupun administrative atau kelalaian. Meskipun begitu *The Universal Declaration of Human Rights* menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan.<sup>22</sup>

### **3. Pencari Suaka**

Pencari suaka atau sering juga disebut *asylum seeker*.

Ketika seseorang melarikan diri dari negara dan mencari suaka di negara lainnya, mereka mengajukan suaka, sebuah hak untuk diakui sebagai pengungsi dan menerima perlindungan hukum dan

<sup>20</sup> "What is a Refugee?", diakses 04 April 2018, <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>

<sup>21</sup> UNHCR, *Global Trends, Forced Displacement in 2015* (UNHCR, 2016), 54.

<sup>22</sup> “What is a Refugee?,” diakses 04 April 2018, <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>

bantuan material. Seorang pencari suaka harus menunjukkan bahwa ketakutannya terhadap penganiayaan di negara asalnya cukup beralasan.<sup>23</sup>

#### **4. European Union**

Uni Eropa adalah organisasi regional di kawasan Eropa dengan 28 negara anggota. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih kompetitif di pasar global. Pada saat yang sama, ia harus menyeimbangkan kebutuhan fiskal dan politik yang negara anggotanya yang independen.

Terdapat 28 negara anggota Uni Eropa diantaranya adalah Austria, Belgium, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Itali, Latvia, Lituania, Luxemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romanisa, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan *the United Kingdom*.<sup>24</sup>

Uni Eropa menghilangkan semua kontrol perbatasan antar negara angota. Hal tersebut memungkinkan adanya *free flow of goods and people* kecuali hal-hal kriminal seperti narkoba. Terdapat tiga badan yang menjalankan Uni Eropa yakni *The EU Council, The European Parliament, The European Commission.* *The EU Council* merepresentasikan pemerintahan nasional. Mereka

<sup>23</sup> "What is a Refugee?," diakses 04 April 2018, <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>

<sup>24</sup> “EU member countries in brief,” diakses 04 April 2018, [https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en)

membuat kebijakan dan mengajukan legislasi. Kepemimpinan politik atau presiden Uni Eropa diganti setiap 6 bulan sekali.

*The European Parliament* membahas dan menyetujui hukum yang diajukan oleh *the EU Council*. Anggotanya dipilih setiap lima tahun sekali.

*The European Commission* bisa dianggap sebagai stafnya Uni Eropa. Mereka memastikan semua anggota secara konsisten berkontribusi di kebijakan regional, agricultural, dan sosial. Uni Eropa didanai oleh negara anggotanya dengan total 120 miliar Euro pertahun.<sup>25</sup>

## 5. Krisis Pengungsi di Eropa

Krisis Pengungsi di Eropa atau biasa disebut krisis pengungsi di Eropa merupakan sebuah istilah yang muncul di awal tahun 2015 ketika meningkatnya orang-orang datang ke Uni Eropa, menyeberangi Laut Mediterrania atau melalui jalur darat melewati selatan Eropa.<sup>26</sup> Kebanyakan pengungsi berasal dari negara dengan mayoritas penduduk Islam. Berdasarkan *United Nations High Commissioner for Refugees*, pada akhir tahun 2015 terdapat 16,1 juta pengungsi.

Sejak April 2015, Uni Eropa telah berusaha untuk mengatasi krisis tersebut dengan meningkatkan alokasi dana untuk

<sup>25</sup> "What is the European Union? How it works and its history?", diakses 04 April 2018, <https://www.thebalance.com/what-is-the-european-union-how-it-works-and-history-3306356>.

<sup>26</sup> "Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts," diakses 04 April 2018, <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>.

operasi patrol di daerah perbatasan Mediterania, merancang rencana untuk memerangi penelundupan migran melalui beberapa inisiatif seperti *military Operation Sophia*, dan mengusulkan sistem kuota baru untuk merelokasi *asylum seeker* di negara-negara anggota Uni Eropa, sehingga hal tersebut dapat mengurangi beban bagi negara anggota yang terletak di *frontliner* seperti Italia dan Yunani. Perpecahan pun juga muncul diantara negara angota Uni Eropa yang bersedia untuk menerima pengungsi dan yang tidak.

## **6. European Refugee Relocation Plan<sup>27</sup>**

Merupakan sebuah rancangan untuk merelokasi pengungsi yang berada di Italia dan Yunani. *European Refugee Relocation Plan* juga sering disebut dengan *Refugee Relocation System*. Pada bulan Mei 2015, EC telah mengajukan permintaan untuk merelokasi 40.000 orang dari Italia dan Yunani selama 2 tahun. Pada bulan September 2015, EC kembali mengajukan permintaan untuk merelokasi 120.000 orang dari Italia, Yunani, dan Hungaria selama 2 tahun.

Hal tersebut dilakukan oleh EC karena negara anggota Uni Eropa yang berada di perbatasan terdepan dengan Laut Mediterania tidak mampu lagi menanggung lonjakan drastis jumlah pengungsi yang akan masuk ke Benua Eropa.

<sup>27</sup> European Commission, *European Solidarity: A Refugee Relocation System*

Pada tahun 2015 terdapat 30.755 aplikasi suaka yang masuk ke Italia dan terdapat 42.356 *irregular border crossings* hanya dalam 2 bulan. Sedangkan di Yunani terdapat 7475 aplikasi suaka dan 137.000 *irregular border crossings* dalam waktu 2 bulan.

Jumlah pengungsi yang harus diambil oleh negara anggota Uni Eropa yang lain berdasarkan kalkulasi yang obyektif disertai dengan kriteria yang terhitung dan terverifikasi seperti jumlah populasi, total GDP, rata-rata aplikasi suaka selama empat tahun sebelumnya, serta tingkat penganguran.

Negara anggota yang menerima pengungsi akan mendapatkan dana sebesar 6.000 Euro untuk setiap pengungsi, sedangkan Italia, Yunani, dan Hungaria mendapatkan 500 Euro untuk setiap pengungsi yang direlokasi sebagai dana pemberian transportasi.

Setiap negara anggota akan menunjuk *Liaison Officers* untuk mencocokkan negara tujuan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pengungsi seperti pengetahuan bahasa, keluarga, budaya, dan sosial, untuk membantu terjadinya integrasi.

## G. Hipotesa

Inkonsistensi Polandia dalam merespons krisis pengungsi, dalam hal ini implementasi *European refugee relocation plan* disebabkan oleh perbedaan identitas Polandia. Hal itu dapat lebih terlihat jelas apabila kita

melihat adanya dualisme identitas di Polandia yang disebabkan oleh proses Eropanisasi yang membuat Polandia mengadopsi nilai dan norma bersama Uni Eropa tetapi di lain sisi Polandia memiliki perbedaan identitas dengan Uni Eropa yang diprakarsai oleh negara-negara Eropa Barat dengan identitas yang berbeda dengan Polandia yang notabene adalah negara Eropa Timur. Faktor kultural tersebutlah yang peneliti duga menjadi konsideran bagi Polandia sebagai anggota Uni Eropa untuk menyetujui adanya *European refugee relocation plan* tetapi hingga tahun 2017 Polandia belum menerima satu pengungsi pun. Hal itu dikarenakan identitas masyarakat Polandia yang homogen dan memiliki perbedaan sejarah dengan negara anggota Uni Eropa lainnya.

## **H. Sistematika Penyajian Skripsi**

Bab II menjelaskan landasan teoritik yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah Teori Konstruktivisme untuk menjelaskan bagaimana identitas yang terkonstruksi dapat kemudian mempengaruhi respons Polandia yang inkonsisten terhadap krisis pengungsi di Eropa. Relasi antara identitas dengan respons tersebut semakin diperjelas dengan pendekatan *Strategic Culture* yang mampu mengkonseptualisasikan peran nilai dan norma dalam inkonsistensi Polandia. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan *Europeanization* untuk menjelaskan integrasi antara Polandia dan Uni Eropa sehingga mampu membentuk identitas Polandia seperti saat ini. Kemudian penulis akan menggunakan teori sekuritisasi guna menggambarkan bagaimana krisis pengungsi di Eropa ini

dianggap sebagai ancaman oleh Polandia baik dari pemerintah atau masyarakat yang mengakibatkan Polandia inkonsisten terhadap isu tersebut. Terakhir, penulis akan menggunakan *human security* sebagai pendekatan untuk menjelaskan bagaimana aspek keamanan manusia menjadi salah satu agenda prioritas dalam identitas Eropa.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis Bab IV berisi sajian data berupa konstruksi identitas Polandia, aksesi Polandia oleh Uni Eropa, dinamika kebijakan Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa termasuk penggambaran proses sekuritisasi yang dilakukan oleh elit politik Polandia. Dalam bab ini juga akan dipaparkan analisis data menggunakan kerangka teoritik yang telah dijelaskan di Bab II.

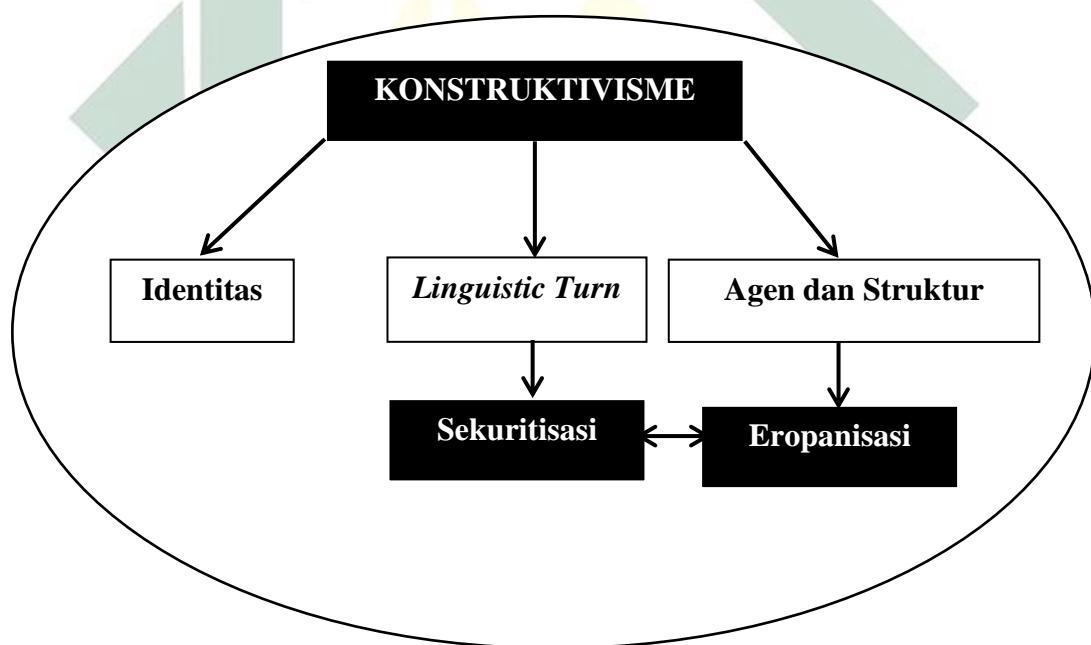
BAB V berisi kesimpulan penelitian dengan menegaskan kembali temuan-temuan penting penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan area-area penting untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

Guna mendapatkan jawaban komprehensif atas rumusan masalah yang dikeluarkan. Peneliti menggunakan tiga landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis data yang peneliti dapatkan. Tiga landasan teori tersebut diantaranya adalah teori konstruktivisme, teori sekuritisasi, konsep Eropanisasi. Berikut bagan operasionalisasi ketiga landasan teori tersebut.

## Bagan 2.1 Operasionalisasi landasan teoritik



Teori konstruktivisme sebagai teori induk digunakan untuk menganalisis alasan inkonsistensi Polandia melalui aspek ideasional termasuk identitas didalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Onuf bahwa pemikiran konstruktivis dipengaruhi oleh ‘*The Linguistic Turn*’ maka peneliti menggunakan teori sekuritisasi sebagai teori kedua untuk melihat proses elit politik Polandia

menjadikan isu krisis pengungsi di Eropa dari isu yang dianggap biasa saja menjadi sebuah ancaman. Penggunaan teori sekuritisasi ini berdasar pada pendapat Onuf bahwa suatu kebijakan tidak terlepas dari bagaimana agen menggambarkan sebuah isu.<sup>28</sup> Terakhir peneliti menggunakan konsep Eropanisasi untuk menjelaskan alasan inkonsistensi Polandia melalui aspek politik dan integrasi Eropa. Secara garis besar ketiga landasan teoritis tersebut saling berkesinambungan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori konstruktivisme sebagai teori utama kemudian menggunakan teori sekuritisasi dan Eropanisasi untuk membantu menganalisis kasus agar lebih dalam pembahasannya.

#### A. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan salah satu teori baru dalam perdebatan kontemporer dalam Ilmu Hubungan Internasional. Konstruktivisme muncul untuk mengevaluasi hasil pergulatan akademik rasionalis-positivis dan reflektivis-pospositivis.<sup>29</sup>

Konstruktivisme dalam penekanannya terhadap norma-norma, agen sosial, dan identitas membawa konstruktivisme berada diantara post-strukturalis dan post modernis. Keambiguan yang ada tersebut membawa konstruktivisme menjadi sebuah pendekatan yang menggunakan jalan tengah (*middle ground*) dalam studi HI.

Sebagaimana Nicholas Onuf menjelaskan bahwa konstruktivisme merupakan sebuah cara dalam menganalisis fenomena HI yang tidak

<sup>28</sup> Nicholas Onuf, *Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International Relations* (New York: Routledge, 2013), 115.

<sup>29</sup> Ceccep Zakarias El Bilad. *Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma* (2011), 66-81.

hanya melihat fenomena berdasarkan kepentingan (*interest*) melainkan terdapat beberapa aspek lain yang mempengaruhi dalam proses penentuan kawan dan lawan, seperti maksud (*intention*), identitas (*identity*), dan alat komunikasi (*language*). Atas dasar hal tersebut, Onuf lebih memahami konstruktivisme merupakan sebuah pendekatan baru dalam menganalisis fenomena Hubungan Internasional.<sup>30</sup>

Dalam pembahasan konstruksi sosial, konstruktivisme membantah argumen Realis dan Neo-Realisme yang memandang bahwa konflik dan perdamaian merupakan suatu hasil yang tetap, tunggal, dan universal dalam ruang dan waktu. Sedangkan Konstruktivisme merupakan sebuah konstruksi sosial yang mana di produksi oleh manusia dan dipengaruhi oleh kepentingan, norma, identitas, dan alat komunikasi sehingga menjadikannya sesuatu yang *flexible*, bergantung pada situasi, kondisi, dan konteks tertentu. Seperti contoh, ketika kita dihadapkan pada realita bahwa di masa perang dingin, konflik dan peperangan lebih diartikan sebagai langkah dalam menjamin keberlangsungan hidup dengan penyebarluasan pengaruh. Namun berbeda ketika pasca perang dingin, konflik dan peperangan lebih diartikan sebagai sebuah bencana bagi dunia yang merusak tatanan sosial.

Kedua, konstruktivisme menekankan pada dimensi sosial dikarenakan terdapat hubungan antara kondisi sosial dengan aktor. Dimana aktor merupakan unsur utama dalam penentu kebijakan namun sifat aktor

<sup>30</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, alternatif, dan reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 266.

sendiri dipengaruhi oleh norma, nilai budaya dan simbol linguistik. Sehingga terbentuknya identitas dan kepentingan suatu aktor tidak lain merupakan hasil konstruksi sosial yang ada.<sup>31</sup> Sebagaimana norma adalah *shared beliefs* yang memberikan arti dan interpretasi terhadap sesuatu maka hal ini menjadi penting dalam menjawab apa yang menyebabkan kepentingan sebuah negara dan dengan apa negara tersebut meraihnya. Norma juga dapat menjadi faktor pembentuk persepsi ancaman bagi sebuah aktor karena sebagaimana konstruktivis percaya bahwa ancaman adalah sesuatu yang dapat dikonstruksi sebagaimana norma tersebut dikonstruksi. Sejalan dengan Clunan yang menyatakan bahwa identitas adalah sebuah konstruksi elite dalam struktur suatu negara yang dibentuk melalui perdebatan.<sup>32</sup>

Lebih lanjut Rawi Abdelal menyatakan bahwa identitas kolektif tersebut dibentuk karena adanya *content* dan kontestasi. *Content* tersebut berisi arti dari sebuah identitas tersebut, hal tersebut dapat berupa norma-norma dan tujuan sosial yang mendefinisikan dan ditemukan diantara kelompok masyarakat. Norma dan tujuan sosial tersebutlah yang kemudian melekat pada suatu kelompok masyarakat yang menjadikannya berbeda dengan kelompok lain. Sedangkan yang dimaksud kontestasi

<sup>31</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, alternatif, dan reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 267.

<sup>32</sup> Anne Clunan, *The Social Construction of Russia's Resurgence* (Baltimore: The John Hopkins University Press), 3.

adalah bagaimana identitas tersebut disetujui oleh masyarakat untuk dijadikan identitas bersama.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan kebijakan luar negeri, Hill dan Wallace menyatakan bahwa kebijakan luar negeri yang efektif berlandaskan pada identitas nasional, kepentingan nasional, dan aspirasi masyarakat. Asumsi tersebut melekat pada sejarah dan mitos suatu negara. Identitas tersebut juga dapat berubah sejalan dengan bagaimana politik menginterpretasi identitas tersebut serta pengaruh aspek eksternal dan internal dalam membentuk hal tersebut.<sup>34</sup> Lebih lanjut Howell juga menekankan bahwa kebijakan luar negeri, yang didefinisikan secara luas, adalah pusat dari rasa identitas nasional seseorang, dan untuk memahami tujuan, peran dan nilai bangsa mereka.<sup>35</sup>

Ketiga, konstruktivisme memandang bahwa politik Internasional bukan merupakan sebuah realitas yang ada secara sendirinya atau alamiah melainkan sesuatu yang dikonstruksikan oleh manusia itu sendiri. Manusia sebagai aktor melakukan interaksi antar aktor yang lain yang didasarkan pada kepentingan, norma, nilai budaya dan simbol linguistik menjadi penentu apakah suatu negara menjadi kawan maupun lawan. Sehingga menjadikan interaksi antara subjek menjadi satu poin penting dalam konstruksi sosial konstruktivisme.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Rawi Abdelal et al., "Identity as a Variable," *Perspective on Politics* 4 (2006), 696.

<sup>34</sup> Hill dan Wallace, "Introduction: actors and actions," dalam *The Actor's in Europe's Foreign Policy*, ed. C. Hill. (London: Routledge, 1996), 8.

<sup>35</sup> D. Howell, *Britannia's Business*. (Prospect, 2006), 26.

<sup>36</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, alternatif, dan reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 268.

Pada dasarnya aspek ontologi konstruktivisme meyakini signifikansi struktur ideasional dalam sistem internasional. Konstruktivisme meyakini bahwa struktur internasional adalah distribusi ide sebagaimana yang diungkapkan oleh Alexander Wendt dalam *Constructing International Politics*.<sup>37</sup> Konstruktivis mengakui eksistensi dan peran konstitutif agen dan struktur baik material maupun ideasional.<sup>38</sup> Hal itu dikarenakan elemen-elemen tersebutlah yang menghidupkan struktur internasional. Sehingga struktur internasional adalah proses sekaligus hasil praktik sosial yang didalamnya tidak hanya mempertemukan fisik antar agen tetapi juga mempertemukan subyektivitasnya.<sup>39</sup>

Konstruktivisme dipilih oleh peneliti karena pendekatan ini juga melihat komunikasi simbolik atau bahasa sebagai konsideran dalam pembahasan fenomena politik internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Hadiwinata bahwa komunikasi simbolik adalah “bahan mentah” yang mengandung kepentingan, intensi, dan identitas yang mengandung otentisitas dan originalitas tinggi yang dapat ditelusuri dari pernyataan para agen (*speech acts*).<sup>40</sup>

Fokus peneliti pada penelitian ini menggunakan konstruktivisme dalam mengkaji persoalan dilemma identitas Polandia sebagai negara anggota Uni Eropa yang memiliki *shared beliefs* dalam menjunjung tinggi

<sup>37</sup> Alexander Wendt. 1995. *Constructing International Politics*. The MIT Press, 71-81.

<sup>38</sup> Cecep Zakarias El Bilad. *Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarp paradigm* (2011), 66-81.

<sup>39</sup> Price dan Reus dalam Cecep Zakarias El Bilad. *Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarpardigma* (2011), 66-81.

<sup>40</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, alternatif, dan reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 269-270.

nilai-nilai kemanusiaan tetapi tidak merespon krisis pengungsi di Eropa dengan baik.

### **B. Copenhagen School and Securitization Theory**

Sebagaimana telah dibahas di sub-bab sebelumnya bahwa pemikiran konstruktivis dipengaruhi oleh *The Linguistic Turn* maka peneliti merasa tepat untuk menggunakan teori sekuritisasi untuk lebih memperdalam *The Linguistic Turn* tersebut. Pada dasarnya *The Linguistic Turn* mencakup tiga hal yakni simbol-simbol linguistik memiliki fungsi konstitutif yang berarti membuat pihak lain melihat sesuatu sebagaimana yang kita bicarakan.<sup>41</sup> *Securitization theory* yang dikembangkan oleh Barrzy Buzan dan Ole Waever merupakan konsep yang paling menonjol dalam *Copenhagen School*. Dapat dikatakan bahwa keamanan adalah *speech act*. Dengan berbicara tentang keamanan, seorang aktor mencoba untuk mengalihkan topik dari politik ke dalam masalah keamanan, dengan demikian aktor tersebut mencoba melegitimasi isu dengan cara-cara luar biasa guna melawan ancaman yang dibangun secara sosial.<sup>42</sup>

Waever tidak hanya menjadikan keamanan sebagai sebuah konstruksi sosial melainkan juga membuka peluang bagi agen sebagai pelaku keamanan (*securitizing actor*) untuk juga ikut andil dalam menyatakan bahwa berbagai isu berpotensi mendatangkan ancaman eksistensial bagi manusia atau negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh

<sup>41</sup> Nicolas Onuf, *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations* (Columbia: University of South Carolina Press, 1989), 18-23.

<sup>42</sup> Barry Buzan. *Security: A New Framework for Analysis*. (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1998), 23-26.

Buzan bahwa sekuritisasi merupakan intersubjektif dan konstruksi sosial.<sup>43</sup>

Dalam proses ini elit politik akan menyatakan sebuah isu yang menjadi ancaman yang nyata. Isu tersebut dapat dikatakan mengancam keamanan jika publik menerima ancaman yang dikonstruksi tersebut dengan memiliki persepsi ancaman sejalan dengan yang dikonstruksi oleh elit tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya langkah yang tepat dalam membujuk publik untuk setuju dengan konteks ancaman yang diwacanakan (proses sekuritisasi).

Secara sederhana sekuritisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk mendramatisasi sesuatu yang tadinya dianggap “normal” menjadi masalah “keamanan”.<sup>44</sup> Kesuksesan dalam proses sekuritisasi dapat tercapai apabila proses tersebut mencapai empat syarat sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Kemampuan pelaku sekuritisasi (*securitizing actor*) dalam meyakinkan publik bahwa suatu obyek rujukan sedang menghadapi ancaman yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Sehingga dibutuhkan kesediaan data yang lengkap dan akurat yang mampu membuat publik menjadi panik terhadap ancaman tersebut.
  2. Pernyataan (*speech act*) yang dipakai harus mampu meyakinkan publik bahwa objek tersebut sedang menghadapi

<sup>43</sup> Marianne Stone, "Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis," *Security Discussion Paper Series 1*, 2-3.

<sup>44</sup> Barry Buzan, Waever, dan Wilde, *A New Framework for Analysis* (Colorado: Lynne Rienne Publisher, 1998), 26-33.

<sup>45</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, alternatif, dan reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 187.

ancaman sehingga dibutuhkanlah jargon ataupun terminology politik yang tepat.

3. Publik yang menjadi audiens harus memiliki tingkat Pendidikan memadai dan akses informasi yang cukup untuk memahami pesan yang disampaikan dengan baik. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa publik memahami *speech act* yang dilakukan pelaku sekuritisasi dan meresponnya dengan tindakan yang rasional.
  4. Konteks sosial-ekonomi yang tepat akan berkontribusi terhadap proses sekuritisasi suatu isu. Seorang pelaku sekuritisasi akan berhasil dalam tindakannya apabila *speech act* diucapkan dalam konteks sosial-ekonomi yang tepat.

### C. Europeanization

Konsep *Europeanization* sering kali terdengar dalam studi integrasi Eropa. Meskipun ada cukup kontestasi konseptual berkaitan dengan pertanyaan apa sebenarnya konsep tersebut, sebagian besar literatur berbicara tentang *Europeanization* adalah sebuah fenomena ketika sesuatu dalam sistem politik dalam negeri dipengaruhi oleh sesuatu di Eropa. Oleh karena itu kita dapat mendefinisikan *Europeanization* sebagai perubahan dalam negeri disebabkan oleh integrasi Eropa.

Sebagaimana dinyatakan di atas, *Europeanization* dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam negeri disebabkan oleh integrasi Eropa. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah perubahan apa yang

diakibatkan oleh *Europeanization*. Hix dan Goetz<sup>46</sup> berpendapat bahwa *Europeanization* merupakan suatu proses perubahan dalam praktik kelembagaan dan kebijakan nasional yang dapat dikaitkan dengan integrasi Eropa. Hal ini sejalan sebagaimana Börzel<sup>47</sup> menyatakan *Europeanization* sebagai suatu proses dimana bidang kebijakan dalam negeri menjadi semakin tunduk pada kebijakan Eropa.

Adapun Ladrech<sup>48</sup> menunjuk pada perubahan yang lebih umum, termasuk juga kewarganegaraan dan identitas nasional. Berdasar pada definisi ini, Radaelli<sup>49</sup> membuat konsepsi *Europeanization* yang mengacu pada proses (a) konstruksi, (b) difusi dan (c) pelembagaan aturan formal dan informal, prosedur, paradigma kebijakan, gaya, cara melakukan sesuatu dan berbagi keyakinan dan norma-norma dan konsolidasi dalam pembuatan keputusan Uni Eropa dan kemudian dimasukkan dalam logika wacana dalam negeri, identitas, struktur politik dan kebijakan publik.

## 1. Dampak Eropanisasi terhadap Kondisi Domestik Negara

### Anggota

Dampak domestik Eropanisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan pada level domestik dimana negara anggota mengadaptasi proses, kebijakan, dan institusinya terhadap

<sup>46</sup> Klaus H. Goetz dan Simon Hix, "Europeanised Politics? European Integration and National Political Systems", (London, Frank Cass, 2000), 18.

<sup>47</sup> Tanja A. Börzel, "Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanisation in Germany and Spain. *Journal of Common Market Studies* 37 (4)" (1999): 574.

<sup>48</sup> R. Ladrech, "Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France", *Journal of Common Market Studies*, Vol. 32, No. 1, (1994): 69-88.

<sup>49</sup> Claudio M. Radaelli, "Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change", European Integration online Papers (EIoP) Vol. 4 (2000): 4

penerapan, norma, peraturan, dan prosedur yang muncul dari sistem pemerintahan eropa.<sup>50</sup> Perubahan pada level domestik ini dapat terjadi jika memenuhi dua syarat. Pertama, Eropanisasi harus *inconvenient* atau ‘susah’ bagi negara anggota sehingga akan muncul tingkatan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara proses, kebijakan dan institusi di tingkat Eropa dan domestik. Ketidaksesuaian tersebut akan memunculkan tekanan untuk melakukan adaptasi. Kedua, terdapat *facilitating factors*, yang dapat berupa elit politik maupun institusi, yang merespons tekanan untuk beradaptasi yang mampu mendorong perubahan.<sup>51</sup>

Melalui pendekatan *Top-Down* dapat dipahami bahwa integrasi eropa mempengaruhi perubahan domestik dan hasil dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, Eropanisasi dapat muncul ditengah perbedaan struktur pemerintah negara anggota Eropa seperti politik, hukum, dan institusi sosial berkaitan dengan pemecahan masalah politik yang membentuk interaksi antara aktor dan kebijakan-kebijakan Eropa. Eropanisasi dimaknai sebagai proses pembangunan institusi di tingkat Eropa guna menyelidiki bagaimana proses Eropanisasi ini berpengaruh terhadap negara

<sup>50</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, “Conceptualizing the Domestic Impact of Europe,” dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 63.

<sup>51</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, “Conceptualizing the Domestic Impact of Europe,” dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 58.

anggota. Hal tersebut menyimpulkan bahwa proses Eropanisasi tentunya mempengaruhi negara anggota Uni Eropa.

Semakin rendah kesesuaian proses, kebijakan, dan institusi antara Eropa dan domestik maka semakin tinggi tekanan untuk adaptasinya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah jika Eropanisasi cocok atau sesuai dengan kondisi domestik maka perubahan domestik (*domestic changes*) tidak diperlukan. Secara umum, jika norma, peraturan, dan pemahaman kolektif Eropa sejalan dengan kebijakan pada norma dan peraturan pada level domestik maka tidak akan masalah-masalah kepatuhan. Kerangka kebijakan Eropa yang beriringan dengan kebijakan dan wacana domestik negara anggota tidak mungkin memicu *collective learning process* yang dapat merubah kepentingan dan identitas aktor.

Pada akhirnya, tekanan untuk adaptasi yang dihasilkan oleh fakta bahwa pemerintahan Eropa yang baru muncul mencakup struktur pengambilan keputusan yang otoritatif yang mungkin berbenturan dengan struktur nasional pembuatan kebijakan, dan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa tidak memiliki opsi keluar karena undang-undang Uni Eropa merupakan hukum negara. Hal ini tentunya sangat berbeda bagi lembaga internasional lainnya yang pengaturan antar pemerintah nya bersifat sukarela

atau bersifat tidak memaksa<sup>52</sup> seperti ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) yang memiliki konsep *non-interference*.

Menurut Borzel, terdapat dua jenis ketidaksesuaian antara kebijakan domestik dengan Eropanisasi yang mampu memunculkan tekanan untuk beradaptasi terhadap negara anggota.<sup>53</sup> Pertama, kebijakan Eropa dapat menyebabkan ketidakcocokan kebijakan (*policy misfit*) antara aturan dan peraturan Eropa dengan kebijakan domestik di negara anggota. Kebijakan pada dasarnya sama dengan masalah kepatuhan. Kebijakan Eropa dapat menentang tujuan kebijakan nasional, standar peraturan, instrumen atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, dan/atau pendekatan pemecahan masalah yang mendasarinya.<sup>54</sup> Ketidaksesuaian kebijakan (*policy misfit*) semacam itu juga dapat memberi tekanan pada lembaga-lembaga yang mendasarinya. Karena *policy misfit* menghasilkan biaya adaptasi (*adaptational cost*) di tingkat domestik, negara-negara anggota berusaha untuk 'mengunggah' kebijakan mereka ke tingkat Eropa untuk mengurangi masalah kepatuhan mereka.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 61.

53 *Ibid.*

<sup>54</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 61.

<sup>55</sup> Ibid., 62.

Ketidaksesuaian yang kedua adalah *institutional misfit*. Eropanisasi dapat menyebabkan ketidakcocokan kelembagaan (*institutional misfit*) yang menentang peraturan dan prosedur domestik serta pemahaman kolektif (*collective understanding*) yang melekat pada mereka. Eropanisasi bahkan dapat mengancam pemahaman kolektif yang mendalam tentang identitas nasional ketika menyentuh norma-norma konstitutif seperti kedaulatan negara.<sup>56</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Olsen bahwa dampak domestik Eropanisasi dapat digambarkan sebagai sebuah proses perubahan di level domestik dimana negara anggota mengadaptasi proses, kebijakan, dan institusi menuju norma dan peraturan yang muncul dari Uni Eropa.<sup>57</sup> Dalam menjelaskan mekanisme perubahan domestik tersebut, penulis menggunakan penjelasan dari Olsen bahwa *collective understanding* yang muncul untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak adalah terkonstruksi secara sosial dalam struktur pemerintahan yang ada. *Collective understandings* dan *intersubjective meanings* ini lah yang akan mempengaruhi cara aktor mendefinisikan tujuannya serta menentukan manakah aksi yang rasional dan tidak. Karena adanya

<sup>56</sup> Checkel dan Risse dalam Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 66.

<sup>57</sup> Olsen dalam Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003) 63.

*collective understandings* dan *intersubjective meanings* tersebut, para aktor lebih berusaha memenuhi ekspektasi masyarakat dibanding dengan memenuhi keinginan pribadinya.

## **2. *Facilitating Factors* sebagai Faktor Pendorong Perubahan Domestik**

Berangkat dari argumen diatas maka Eropanisasi dimaknai sebagai kehadiran peraturan, norma, dan struktur baru pada negara anggota dimana mereka harus menyesuaikannya ke dalam struktur domestiknya. *Sociological Institutionalism* menawarkan dua penjelasan tentang perubahan domestik sebagai respons terhadap Eropanisasi diantaranya adalah penjelasan strukturalisme dan yang kedua lebih kepada *agency-centered*. Dalam penjelasan strukturalisme, ia menjelaskan bahwa institusi yang sering berinteraksi dan terletak pada kondisi lingkungan yang mirip dapat memunculkan kesamaan dalam struktur dan praktek organisasinya seiring berjalannya waktu.

Sedangkan, dalam pendekatan *agency-centered* lebih menitikberatkan proses sosialisasi dimana aktor berusaha untuk menginternalisasikan norma dan peraturan baru yang tepat melalui proses perdebatan dan *social learning* untuk mendefinisi ulang kepentingan dan identitasnya.<sup>58</sup> Penjelasan ini juga memperjelas

<sup>58</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 63.

bahwa *misfit* yang terjadi pada negara anggota adalah kondisi awal bagi proses sosialisasi agar dapat terlaksana.

Olsen juga menjelaskan bahwa semakin cocok norma dan ide Eropa dengan kondisi domestik di negara anggota maka akan lebih mudah terjadinya proses internalisasi norma dan ide tersebut begitu juga sebaliknya.<sup>59</sup> Agar internalisasi norma dan terciptanya identitas baru tersebut diperlukan adanya *mediating factor*, Dalam hal ini Borzel membagi dua jenis *mediating factor* yakni *change agents* dan *political culture*.

*Change agents* dibutuhkan untuk menekan pembuat kebijakan untuk memulai perubahan menggunakan argumen moral dan konstruksi strategis untuk membujuk aktor agar mau mendefinisikan kembali kepentingan dan identitas mereka. Persuasi dan argumentasi adalah mekanisme di mana *change agents* ini mencoba untuk menginduksi perubahan.<sup>60</sup> Mereka mengharapkan norma dan identitas bersama secara kolektif untuk membujuk aktor lain agar mempertimbangkan kembali tujuan dan preferensi mereka. Proses tersebut diharapkan dapat merubah kepentingan dan identitas para aktor agar mau menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

<sup>59</sup> Johan P. Olsen, "Europeanization and Nation-State Dynamics." Dalam *The Future of The Nations*, ed. Sverker Gustavsson et al. (New York: Routledge, 2004), 272.

<sup>60</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 67.

*Political culture* atau budaya politik dan lembaga informal lainnya memiliki peran untuk pembentukan konsensus dan memfasilitasi perubahan domestik sebagai tanggapan terhadap Eropanisasi. Lembaga informal membawa pemahaman kolektif tentang perilaku yang tepat yang sangat mempengaruhi cara-cara di mana para pelaku domestik menanggapi tekanan Eropaisasi. Kedua, budaya politik yang berorientasi konsensus memungkinkan untuk berbagi *adaptational cost* yang memfasilitasi akomodasi tekanan untuk adaptasi.<sup>61</sup>

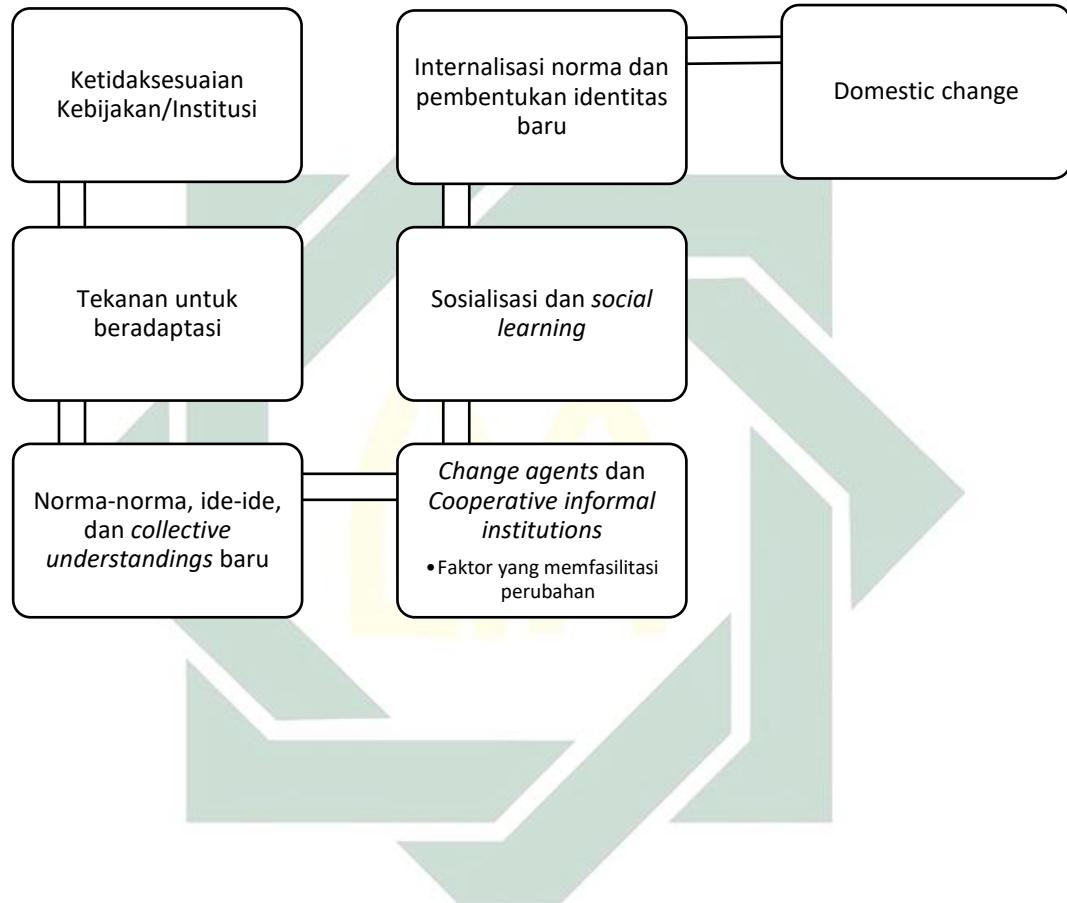
*Change agents* dan *politic cultures* akan mempengaruhi ide-ide, norma-norma, dan pemahaman kolektif Eropa yang tidak sejalan di tingkat domestik yang akan diinternalisasi oleh para aktor domestik yang menimbulkan perubahan dalam negeri. Logika perubahan dalam negeri ini menekankan perdebatan, pembelajaran, dan sosialisasi sebagai mekanisme di mana norma-norma dan identitas baru yang berasal dari proses-proses Eropanisasi diinternalisasi oleh para pelaku domestik dan mengarah pada definisi-definisi baru tentang kepentingan dan identitas kolektif.

---

<sup>61</sup> Katzenstein dalam Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, “Conceptualizing the Domestic Impact of Europe,” dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 68.

Proses perubahan domestik tersebut dapat digambarkan melalui bagan berikut ini:

## Bagan 2.2 Proses Perubahan Domestik atas Eropanisasi<sup>62</sup>



<sup>62</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 2-12.

Pada dasarnya perubahan domestik sebagai respon terhadap Eropanisasi dapat lemah atau kuat tergantung tingkat tekanan adaptasinya dan keberadaan *facilitating factors*. Borzel membedakan perubahan domestik dalam tiga tingkatan sebagai berikut:<sup>63</sup>

### *1. Absorption*

Negara-negara anggota memasukkan kebijakan atau ide Eropa ke dalam program dan struktur domestik mereka, masing-masing, tetapi tanpa banyak memodifikasi proses, kebijakan, dan lembaga yang ada. Tingkat perubahan dalam negeri rendah.

## 2. Accommodation

Negara-negara anggota mengakomodasi tekanan Eropaisasi dengan mengadaptasi proses, kebijakan, dan lembaga yang ada tanpa mengubah fitur-fitur penting mereka dan pemahaman kolektif yang mendasarinya yang melekat pada mereka. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan 'menambal' kebijakan dan institusi baru ke yang sudah ada tanpa mengubah yang terakhir. Tingkat perubahan domestik sederhana.

<sup>63</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, “Conceptualizing the Domestic Impact of Europe,” dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 69.

### 3. Transformation

Negara anggota menggantikan kebijakan, proses, dan lembaga dengan yang baru, yang secara substansial berbeda, atau mengubah yang sudah ada dan/atau adanya perubahan pemahaman kolektif secara mendasar. Tingkat perubahan domestik tinggi.

Tabel 2.1  
Tingkat Perubahan Domestik<sup>64</sup>

	Tekanan adaptasi 'tinggi'	Tekanan adaptasi 'sedang'	Tekanan adaptasi 'rendah'
<i>Facilitating factors</i>	<i>Inertia</i> (kecuali ada paksaan eksternal)	<i>Gradual transformation</i>	<i>Accommodation</i>
<i>No facilitating factors</i>	<i>Inertia</i>	<i>Accommodation/absorption</i>	<i>Absorption</i>

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa respons negara anggota terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dapat beragam. Jika tekanan yang diberikan kepada negara anggota tinggi dan terdapat *facilitating factors* yang

<sup>64</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003),

membantu untuk menginternalisasi norma dan ide baru yang muncul maka akan muncul *inertia* yang dapat diartikan sebagai tidak adanya perubahan dalam domestik negara anggota. Dalam kondisi tersebut perubahan domestik dapat terjadi jika ada paksaan keras dari pihak eksternal dalam hal ini adalah Uni Eropa. Sedangkan jika tidak ada *facilitating factors* yang memediasi penerimaan norma dan ide baru dari Uni Eropa maka tidak akan ada perubahan dalam domestik negara anggota.

Jika tekanan adaptasi yang diberikan sedang dan terdapat *facilitating factors* maka akan terjadi transformasi secara bertahap terhadap domestik negara anggota. Sedangkan jika tidak ada *facilitating factors* maka hanya akan terjadi *accommodation* atau *absorption*. Terakhir jika tekanan adaptasi rendah dan terdapat *facilitating actors* maka *accommodation* akan terjadi di domestik negara anggota, tetapi jika tidak ada *facilitating factors* maka hanya akan terjadi *absorption*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Setelah menjelaskan teori-teori yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis data yang ditemukan, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan analisis pada data yang telah didapatkan tersebut. Pada bab ini peneliti juga akan memberikan penjelasan rancangan penelitian yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Secara garis besar, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus atas dasar pertimbangan fokus peneliti untuk menggali informasi yang spesifik atas suatu kasus tunggal yakni respons Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa. Dalam menggali informasi atau data tersebut peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena peneliti lebih banyak memanfaatkan data sekunder yang tersebar luas baik dalam bentuk buku maupun berita-berita di internet.

Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Pada teknik ini peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data secara terus menerus hingga mendapatkan jawaban tepat atas rumusan masalah. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar data yang digunakan peneliti adalah data sekunder sehingga peneliti harus dengan cermat memilih, menyederhanakan, dan mentransformasi data kasar untuk disesuaikan dengan data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>65</sup> Sedangkan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari dan ditarik dari sebuah kasus tunggal.

### **B. Lokasi dan Waktu**

Dikarenakan penelitian lebih banyak menggunakan data sekunder dan data primer non-interaktif maka penelitian dilakukan jarak jauh melalui pencarian sumber literatur di internet. Dalam penggerjaannya, peneliti lebih banyak menulis hasil penelitian di Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dan *Coworking Space* Koridor Surabaya. Penelitian dilakukan sejak bulan Maret 2018 hingga Juli 2018.

### C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Polandia. Dalam menjawab rumusan masalah, Polandia bertindak sebagai unit analisis, yaitu yang perilakunya hendak peneliti jelaskan atau juga bisa disebut dengan variabel independen<sup>66</sup>, sedangkan inkonsistensi respons Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa sebagai unit eksplanasi atau variabel

<sup>65</sup> Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

<sup>66</sup> Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 39.

dependen yaitu yang dampaknya terhadap unit analisis hendak peneliti amati.

#### **D. Tahap-Tahap Penelitian**

## 1. Pemilihan Tema, Topik, dan Kasus

Pada tahap ini peneliti meyakinkan diri bahwa peneliti mampu dan menguasai kasus yang akan dipilih. Peneliti memilih kasus krisis pengungsi di Eropa karena peneliti tertarik dengan penelitian studi Eropa dan tertarik memilih Polandia sebagai subyek penelitian karena peneliti tertarik untuk menganalisis identitas Polandia sebagai negara yang pernah ‘jatuh-bangun’ selama tiga kali dalam jangka waktu kurang lebih 10 abad. Dalam tahap ini peneliti memilih tema dan studi kasus terlebih dahulu, kemudian menentukan unit analisis, dan yang terakhir menentukan judul.

## 2. Pembacaan Literatur

Setelah peneliti memperoleh kasus, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, berita di internet, *policy brief* yang terkait dengan kasus tersebut.

### 3. Perumusan Masalah Penelitian

Setelah membaca literatur terkait, peneliti menentukan rumusan masalah.

#### 4. Pengumpulan data

Setelah menentukan fokus permasalahan, peneliti kembali mengumpulkan data baik sekunder dan primer. Pengumpulan data terus berlanjut hingga peneliti yakin bahwa data yang ditemukan mampu menjawab rumusan masalah secara paripurna.

#### 5. Pengolahan data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan klasifikasi data guna mempermudah pembaca memahami data yang peneliti sajikan dan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data.

#### 6. Analisis data

Dalam hal tahap analisis data, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah dengan data yang ada dan dikemas dalam kerangka teoritik sebagai alat analisis.

#### 7. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti berusaha meringkas hal-hal yang telah disampaikan di bab sebelumnya.

#### 8. Laporan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan peneliti. Bagian ini merupakan salah satu pertanggung jawaban peneliti yang disampaikan melalui tulisan untuk kepentingan umum.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagian besar informasi yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder yang dijadikan referensi ialah buku, artikel, laporan tahunan, rekaman

video, *policy brief*, berita baik dalam media cetak maupun internet. Peneliti juga tetap menggunakan data primer seperti laporan, pidato, ataupun pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak otoritatif Uni Eropa dan Polandia. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Hamidi, teknik atau metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perseorangan.<sup>67</sup>

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>68</sup> Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber yang terpercaya. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak yang membahas hal-hal yang terkait dengan topik yang diteliti.

#### F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman atau biasa dikenal dengan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas.<sup>69</sup> Komponen dalam analisis data sebagai berikut:

<sup>67</sup> Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004). 72.

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

### 1. Reduksi Data

Pada bagian ini peneliti memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasi data kasar yang peneliti dapatkan. Dalam hal ini peneliti memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 2. Penyajian Data

Pada bagian ini peneliti menyusun data yang telah disesuaikan dan diklarifikasi sehingga peneliti lebih mudah untuk menguasai data.

### 3. Verifikasi

Pada bagian ini peneliti menemukan data-data yang dapat diuji kebenarannya dan kecocokannya sehingga mampu digunakan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

## G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam melakukan keabsahan data yang telah terkumpul, peneliti melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan diantaranya dosen pembimbing dan teman sesama mahasiswa. Peneliti juga melakukan observasi secara terus menerus terhadap subyek yang diteliti. Hal ini dikarenakan studi kasus yang dipilih peneliti cukup tergolong kontemporer.

## **BAB IV**

---

Setelah peneliti menjelaskan teori konstruktivisme, sekuritisasi, dan eropanisasi sebagai landasan teoritik pada bab II. Pada bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian di bagian akhir bab, peneliti akan menganalisis data tersebut dengan landasan teoritik yang telah dijelaskan di bab II.

Berdasarkan teori konstruktivisme, terdapat tiga hal penting yang peneliti tekankan sebagai alasan atau penyebab inkonsistensi respons Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa yakni identitas, *linguistic turn*, agen dan struktur. Pertama, pada aspek identitas telah ditemukan tiga identitas mendasar yang dimiliki oleh Polandia yakni: 1) Benteng kekristenan Eropa; 2) Homogen dalam sisi agama dan etnis; 3) Norma dan nilai yang tidak sepenuhnya sama dengan Uni Eropa. Kedua, dari sisi *linguistic turn* peneliti menemukan adanya sekuritisasi pengungsi yang dianggap berbahaya bagi Polandia. Konstruksi ini dimulai oleh aktor negara seperti pemerintah Polandia dan elit politik Partai PiS kemudian bergulir ke aktor non negara seperti CBOS yang membuat jajak pendapat yang menunjukkan bahwa 75% masyarakat Polandia tidak setuju untuk menerima pengungsi. Ketiga, Kesuksesan sekuritisasi tersebut berujung pada tidak adanya *facilitating factor* sebagai agen untuk mendukung terealisasinya *European refugee relocation plan* di Polandia sebagaimana dijelaskan oleh konsep Eropanisasi.

## A. Konstruksi Identitas dan Sejarah Polandia

Masyarakat Polandia adalah keturunan bangsa Slavia yang telah menduduki wilayah Eropa Tengah dan Timur sejak abad ke-4. Sejarah dan identitas Polandia dimulai pada tahun 966, ketika Mieszko, pemimpin Polandia pada saat itu yang memimpin bangsa Slavia, memilih untuk dibaptis menjadi seorang kristiani guna mengkonsolidasi kekuatannya yang pada akhirnya diikuti oleh seluruh bangsa Polandia.<sup>70</sup> Pengadopsian agama Kristen dari Roma (*Western Christianity*) menjadi hal yang signifikan bagi masyarakat Polandia sebagaimana mereka menjadi bagian dari peradaban barat (*Western civilization*).<sup>71</sup> Hal ini juga menjadikan Polandia berada di lindungan Paus.<sup>72</sup> Berdasarkan sejarah tersebut menjadi titik krusial dimana Polandia dikonstruksi sebagai *the 'Christ of Nations'* atau negara kristen.<sup>73</sup>

Pada mulanya kita dapat menyimpulkan bahwa Polandia merupakan negara dengan politik identitas ke-timur-annya, dilihat dari sisi religi dan etnis Slavia yang merupakan warga negara Polandia. Dalam hal ini, Maria Janon memperjelas sekaligus menepis anggapan tersebut dalam bukunya yang berjudul *Poland between the West and East*. Hal tersebut,

<sup>70</sup> Lukasz Kaminski dan Maciej Korkuc, *A guide to the history of Poland* (Krakow: Instytut Pamieci Narodowej, 2016), 9.

<sup>71</sup> Educational Materials for International Student Tours to Holocaust Sites in Poland: History of Poland-Timeline. Diakses pada 2 Juli 2018 melalui <http://www.galiciajewishmuseum.org/>.

<sup>72</sup> "Learn the History of Poland in 10 Minutes," Culture.PL, diakses 08 Juli 2018, <https://culture.pl/en/article/learn-the-history-of-poland-in-10-minutes>.

<sup>73</sup> "Polkosc: The Legacy of Polish Past in its Present Identity Struggles," University of Oxford Faculty of Law, diakses 12 Juli 2018, <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/02/polkosc-legacy>.

bisa kita pahami jika kita melihat dinamika kekuasaan yang terjadi di wilayah Polandia dan sekitarnya. Menurutnya, pencampuran ini bermula ketika Byzantium mengalami perpecahan di internalnya sebagai akibat dari tumpul dan stagnannya perkembangan di Byzantium sendiri<sup>74</sup>.

Selama kurang lebih satu abad, Byzantium mengalami perpecahan dan penyusutan kultur. Sehingga Byzantium semakin jauh dari kalimat *eternal and continuous procession towards a higher form of existence.* Kondisi yang berbeda terlihat di barat dimana mereka terus meningkatkan peradabannya. Sebagai misi penyelamatannya agar Byzantium tetap eksis maka ia meminjam konsep peradaban barat namun tidak secara langsung dengan menggunakan budaya latin yang ada di Yunani yang mana budaya itu sendiri merupakan warisan dari barat<sup>75</sup>. Dalam hal ini, Kłoczowski, mendefinisikan barat sebagai *dynamic development* maka dari itu barat memiliki kemajuan peradaban yang sangat impresif sedangkan timur sebagai *persisting civilization.*

Menurut sejarawan Polandia, Potkański, bangsa Slavia termasuk Polandia, tidak dapat memungkiri bahwa gereja barat telah memenangkan proses peradaban sehingga mau tidak mau bangsa Slavia harus mengikuti peradaban barat. *The Slavic nations, including Poles, “have no reason to*

<sup>74</sup> Janion Maria, "Poland between the West and East," *Teksty Durgie*: Special Issue English Edition 1 (2014): 14.

75 Ibid

*regret following the West because, ultimately, it is the West that has won the great civilizational procession and it is the West that remained*’.<sup>76</sup>

Namun, hal tersebut tidak lantas membuat Polandia menjadi sebuah negara yang masuk ke dalam kategori *western country*. Meminjam istilah yang dibuat oleh Edward W. Said yaitu orientalisme.<sup>77</sup> Jika kita melihat Kristen ortodoks yang berkembang di Polandia dengan kacamata orientalisme maka dapat dipahami bahwa ortodoks bersifat tidak logis, terbelakang, stagnan, dan tidak memiliki kontribusi terhadap perkembangan dunia<sup>78</sup>.

Polandia juga sering disebut sebagai benteng kekristenan di Eropa. Hal itu dikarenakan pada tahun 1630an Polandia menghentikan invasi Kekaisaran Islam Turki.<sup>79</sup> Terlebih lagi pada tahun 1683, pasukan Polandia yang dipimpin oleh King Jan III Sobieski membantu Kekaisaran Suci Roma untuk menghentikan pengepungan Vienna oleh Kekaisaran Turki. Kemenangan itu pun diraih oleh Polandia yang menjadikan cerita akhir bagi ekspansi Kekaisaran Turki.<sup>80</sup> Berdasarkan sejarah tersebut, selama berabad-abad Polandia telah mengkonstruksi dirinya sebagai *Christian fighter*, pelindung *the Eastern borders* melawan *non-believer*. Konstruksi sejarah yang seperti ini adalah salah satu faktor terbesar yang

<sup>76</sup> Janion Maria, "Poland between the West and East," *Teksty Durgie*: Special Issue English Edition 1 (2014): 15.

<sup>77</sup> Ibid., 21.

78 Ibid.

<sup>79</sup> Lukasz Kaminski dan Maciej Korkuc, *A guide to the history of Poland* (Krakow: Instytut Pamieci Narodowej, 2016), 32.

<sup>80</sup> Educational Materials for International Student Tours to Holocaust Sites in Poland: History of Poland-Timeline. Diakses 2 Juli 2018 melalui <http://www.galiciajewishmuseum.org/>.

mendorong agama sangat menonjol dalam pembentukan identitas nasional.<sup>81</sup>

Keberhasilan Polandia dalam melindungi Eropa juga terjadi lagi ketika pasukan Polandia berhasil meruntuhkan kekuatan pasukan Bolshevik di perbatasan Warsawa pada tahun 1920. Ancaman pasukan Bolshevik memasuki Warsawa adalah hancurnya budaya dan identitas Eropa dengan menciptakan sebuah revolusi di tanah Eropa. Namun, pasukan Polandia berhasil memukul mundur Bolshevik dan mencegah hancurnya peradaban Eropa.

Elit politik Polandia juga berperan dalam proses pembentukan pandangan dan perspektif masyarakatnya bahwa Eropa barat, budaya Latin dan Kristen merupakan pusat peradaban dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Polandia digambarkan memiliki peran besar dalam melindungi nilai-nilai tersebut dari ancaman-ancaman yang datang dari timur khususnya Rusia. Namun *framing* tersebut tidak berdampak besar terhadap masyarakat Polandia, karena di abad tersebut masih sedikit masyarakat Polandia yang mempunyai akses terhadap buku ataupun pendidikan<sup>82</sup>. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya pembatasan di sistem pendidikan karena beberapa daerah di Polandia di kuasai oleh Rusia, Jerman dan Austria.

<sup>81</sup> "Polkosc: The Legacy of Polish Past in its Present Identity Struggles," University of Oxford Faculty of Law, diakses 12 Juli 2018, <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/02/polkosc-legacy>.

<sup>82</sup> Mach Zdzisław, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000): 1-15, [www.humanityaction.org/files/278-Polish\\_National\\_Culture\\_and\\_its\\_Shifting\\_Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf).

Pasca perang dunia I, Polandia telah mendapatkan pengakuan oleh negara-negara Barat bahwa ia adalah kerabat negara-negara Eropa barat, ia memiliki identitas nasional yang pro terhadap peradaban Barat, Kristen dan budaya Latin dan juga menanamkan nilai-nilai keimanan Kristiani, keberanian, keyakinan hingga loyalitas terhadap Eropa. Pengakuan tersebut didapatkan pasca kemenangan pasukan Polandia menghadapi tentara Bolshevik dari Uni Soviet. Elit politik dalam hal ini berperan besar dalam membentuk nilai-nilai yang pro Eropa barat kepada rakyatnya. Namun sayangnya, air susu dibalas air tuba. Loyalitas Polandia terhadap Eropa dibalas dengan pengabaian serangan Jerman dan Rusia atas Polandia. Bahkan pihak barat menyetujui ketika Polandia di masukkan ke dalam lingkaran pengaruh Soviet. Polandia sebagai rompi perlindungan peradaban Eropa ditinggalkan sendirian oleh Eropa. Hal tersebut menjadi titik kekecewaan Polandia terhadap Eropa sekaligus menjadi sumber kepahitan dan campur aduk perasaan bangsa Polandia terhadap Eropa.

Pasca perang dunia II, Polandia berada di bawah pemerintahan komunis Uni Soviet yang berdampak pula pada putusnya hubungan antara Eropa dan Polandia. Polandia mendapat pandangan sebagai negara timur yang komunis, kemiskinan dimana-mana, krisis ekonomi permanen, pelanggaran hak asasi manusia, dan atheis<sup>83</sup>. Sehingga jauh dari kata

<sup>83</sup> Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000): 6, [www.humanityaction.org/files/278-Polish\\_National\\_Culture\\_and\\_its\\_Shifting\\_Centres.pdf..](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf)

memenuhi kriteria sebagai negara Eropa yang mapan, ber-demokrasi, dan berkeyakinan.

Hingga akhirnya di tahun 1989-an muncul sebuah slogan politik “*return to europe*” yang merupakan awal mula terjadinya transformasi besar di dalam berbagai aspek di Polandia pasca runtuhnya kekuasaan komunis Uni Soviet. Slogan itu juga menjadi bagian dari agenda besar Polandia untuk mengubah perspektif masyarakat Eropa terhadap Polandia sehingga terbuka ruang bagi Polandia untuk bergabung ke dalam organisasi supranasional Uni Eropa. Ide tersebut muncul dipengaruhi oleh aspek historis yang diyakini bangsa Polandia<sup>84</sup>. Selama satu abad terakhir, Mitologi bangsa Polandia sendiri mengklaim dirinya sebagai pelindung masyarakat Eropa, barat, umat Kristen hingga budaya Latin atas serangan yang datang dari budaya-budaya yang masuk. Mitologi nasional Polandia mulai terbentuk pada abad 19 ketika bangsa Polandia dipenuhi oleh masyarakat yang anti terhadap kebangkitan militer Rusia pada tahun 1830 hingga 1863. Pada saat perang Napoleon, Polandia mendukung Perancis berperang dengan Rusia agar ketika Perancis menang, kemerdekaan dapat tercipta lagi di Polandia. sehingga hal tersebut memberi gambaran terhadap masyarakat Polandia bahwa Perancis sebagai simbol kebebasan dan peradaban Eropa sedangkan Rusia sebagai simbol masyarakat barbar. Dalam hal ini, seniman mengambil peran yang cukup besar dalam proses pembentukan identitas nasional Polandia. Peperangan ini kemudian

<sup>84</sup> Ibid., 1-2.

diangkat oleh seniman musik, seni rupa, literatur, hingga theater di abad 19 sebagai sejarah mitologi bangsa Polandia sekaligus menjadi identitas politik Polandia.<sup>85</sup>

Telah banyak seni rupa, musik literatur, hingga teater di abad 19 yang menggambarkan aksi heroik rakyat Polandia sebagai front terdepan yang menghambat serangan dari bangsa di luar Eropa. Maka, seniman pada saat itu menjadi media yang mengedukasi masyarakat Polandia dalam proses pembentukan identitas nasional Polandia. Adapun beberapa orang seniman yang dijadikan sebagai *founding fathers* budaya nasional Polandia karena kontribusinya dalam mengenalkan masyarakat terhadap legenda kepahlawanan pasukan Polandia. Mereka adalah, seorang penulis bernama Adam Mickiewicz, seorang pelukis bernama Piotr Michalowski dan Juliusz dan Wojciech Kossak. Terdapat juga pelukis yang bernama Matejko, Matejko sangat terkenal dan menjadi pelukis yang mampu mempengaruhi masyarakat Polandia. Hasil karyanya juga turut berkontribusi dalam menjelaskan hubungan erat Polandia dengan Eropa<sup>86</sup>. Salah satu karyanya terpajang megah di galeri Vatikan, dalam lukisan tersebut Matejko berusaha untuk memvisualkan peran Polandia dalam perang Vienna. Lukisan tersebut menjadi sebuah karya yang menunjukkan bahwa Polandia berperan besar terhadap masyarakat Eropa dan Kristen dalam melindungi peradaban Eropa dan keyakinannya.

<sup>85</sup> Davies (1981) dalam Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000): 2, [www.humanityaction.org/files/278-Polish\\_National\\_Culture\\_and\\_its\\_Shifting\\_Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf).

<sup>86</sup> Ibid., 3.

Meskipun begitu, kondisi Polandia sangat dinamis dalam menjaga wilayah kedaulatannya. Seringkali Polandia menerima banyak invasi dari asing. Hal ini dikarenakan banyaknya invasi asing dari negara kerajaan tetangga seperti Turki, Rusia, Prussiam dan Kekaisaran Austria. Hal tersebut juga sempat membuat Polandia hilang dari peta selama serratus dua puluh tiga tahun karena kebijakan denaturalisasi penduduk Polandia oleh para penjajah.<sup>87</sup>

Fakta mengenai diabaikannya Polandia dalam beberapa kurun waktu dapat dipahami ketika melihat sifat hubungan antara Polandia dengan Eropa. Dalam jurnal yang ditulis Mach, hubungan yang terbentuk antara Polandia dengan Eropa bersifat asimetris<sup>88</sup>. Kontribusi Polandia terhadap kemajuan peradaban Eropa yang minim membuat Eropa tidak lebih membutuhkan Polandia melainkan, Polandia yang lebih membutuhkan Eropa. Terlebih, pengaruh Eropa terhadap Polandia jauh lebih besar dibandingkan pengaruh Polandia terhadap Eropa. Sehingga hal tersebut menciptakan suatu pandangan bahwa Polandia merupakan negara *periphery* di lingkup Eropa.

Mach menyimpulkan bahwa keterasingan Polandia di Eropa juga dipengaruhi oleh faktor bahasa yang negara tersebut gunakan. Menurutnya, faktor bahasa yang tidak terlalu muncul popular di lingkup Eropa juga semakin membuatnya terpuruk sekaligus menjadi legitimasi

<sup>87</sup> “Learn the History of Poland in 10 Minutes,” Culture.PL, diakses 08 Juli 2018

<sup>88</sup> Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000): 6, [www.humanityaction.org/files/278-Polish\\_National\\_Culture\\_and\\_its\\_Shifting\\_Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf).

bahwa Polandia merupakan negara periphery<sup>89</sup>. Tidak seperti bahasa negara Eropa yang lain, seperti Perancis, Jerman dan Italia yang bahasanya mampu tersebar luas secara regional maupun internasional.

Ketika Polandia bertransformasi menjadi negara komunis dibawah kekuasaan Soviet, komunis Polandia membentuk dua pusat yang berfokus pada Politik dan Ekonomi. Pembagian ini dilakukan dalam rangka melancarkan misi sovietisasi Polandia di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahannya. Sovietisasi ini sifatnya mengintervensi dan mendominasi proses pembuatan keputusan Polandia baik di lingkup domestik maupun mancanegara. Dampaknya adalah adanya perubahan konsep dalam budaya pemilihan pemimpin daerah, birokrasi, kekuasaan, dan properti dan lainnya. Meskipun begitu, Sovietisasi yang dilakukan tidak berdampak pada ideologi rakyat Polandia. Polandia tidak memandang Soviet sebagai pusat peradaban dunia dan tidak layak menyandang gelar panutan dikarenakan sifatnya yang primitif dan barbarian<sup>90</sup>. Berbeda dengan pandangan Soviet terhadap Polandia, Soviet dan negara timur yang lain memandang Polandia sebagai sumber nilai-nilai peradaban dimana Polandia menerima pencampuran budaya antara Eropa Barat dan Timur dikarenakan letaknya yang cukup strategis. Maka, dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan perlakuan terhadap negara periphery ketika negara tersebut merasa dirinya negara core.

<sup>89</sup> Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000): 6, [www.humanityaction.org/files/278-Polish\\_National\\_Culture\\_and\\_its\\_Shifting\\_Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf).

<sup>90</sup> Ibid., 8.

Seperti dalam Mach, sedikit sekali negara-negara timur yang kecil dan lemah seperti Lithuania dan Ukraina disebut dalam sejarah Polandia<sup>91</sup>. Polandia lebih gemar menyebut negara-negara Eropa. Begitu pula dalam sejarah yang ditulis negara Eropa seperti Jerman, sedikit sekali Polandia disebut dalam deskripsi Eropa masa lalu.

Ia juga menambahkan bahwa identitas Polandia juga terbentuk secara natural melalui banyaknya konfrontasi yang telah ia lalui terhadap negara-negara tetangganya<sup>92</sup>. Salah satu contohnya adalah Jerman. Polandia memandang Jerman sebagai negara yang berbahaya, ambisius akan kekuasaan, dan merupakan musuh lama Polandia. Namun, di satu sisi Polandia juga meyakini Jerman sebagai pusat peradaban yang memiliki prinsip yang sama dengan peradaban Eropa. Harapan rakyat Polandia agar dapat menjalin hubungan kembali di Eropa masih besar, banyak masyarakatnya yang berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh rakyat Polandia dalam melindungi Eropa seharusnya layak untuk diapresiasi dan mendapat perlakuan yang lebih baik oleh negara-negara Eropa<sup>93</sup>.

Di tahun 1989, ketika Mikhail Gorbachev turun dari jabatannya sebagai presiden Rusia, sekaligus menandakan runtuhnya kekuasaan Uni Soviet sehingga harus terpecah dan lepas dari negara-negara satelitnya.

<sup>91</sup> Mach Zdzisław, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000): 10, [www.humanityaction.org/files/278-Polish\\_National\\_Culture\\_and\\_its\\_Shifting\\_Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf).

<sup>92</sup> Ibid., 9.

<sup>93</sup> Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", 8.

Polandia memanfaatkan momentum tersebut untuk merubah persepsi negara Eropa agar dapat diterima lagi sebagai kerabat negara Eropa. Seketika elit politik Polandia memunculkan sebuah slogan politik yang bertajuk “*return to europe*”. Slogan tersebut di proklamasikan sebagai tujuan utama politik Polandia sebagai sinyal bahwa Polandia ingin berkontribusi dalam persatuan uni Eropa<sup>94</sup>.

Pada tanggal 25 September 1989. Menteri luar negeri Polandia bernama Krzysztof Skubiszewski mendatangi konferensi PBB untuk mengkonfirmasi mengenai pernyataan Polandia yang bersedia untuk kembali pada Eropa, tempat dimana seharusnya ia berada. Dalam hal ini Polandia semakin dekat dengan Eropa. 30 Januari 1990, Mazowieckie sebagai perdana menteri Polandia menghadiri rapat dewan negara-negara Eropa untuk mengkonfirmasi bahwa Polandia telah memenuhi syarat sebagai anggota persatuan negara Eropa. Dalam deklarasi tersebut Mazowieckie menjelaskan bahwa Polandia kini sepenuhnya telah memegang teguh nilai-nilai demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan pluralisme<sup>95</sup>.

Elit dan masyarakat Polandia meyakini bahwa keterlibatan mereka dalam European Union akan memberikan dampak positif di berbagai bidang. Yang pertama dalam segi ekonomi, masyarakat Polandia akan memiliki keuntungan ekonomi yang cukup menggiurkan sekaligus hal

---

<sup>94</sup> Ibid., 10.

<sup>95</sup> Mach Zdzislaw, “Polish National Culture and its Shifting Centres”, Centre for European Studies Journal (2000): 11, [www.humanityaction.org/files/278-Polish\\_National\\_Culture\\_and\\_its\\_Shifting\\_Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf).

tersebut akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Polandia. Polandia akan dapat lebih mudah menjual hasil pertanian dan perkebunan domestiknya di pasar Eropa. Dengan begitu para petani dapat menjual produknya dengan harga yang lebih menguntungkan. Dari segi politik, suara Polandia di kancah politik internasional tentu akan meningkat dan hal tersebut akan dapat mempermudah proses pembangunan domestik yang diselaraskan dengan politik internasional.

Pengklaiman Negara Polandia sebagai negara Eropa kini telah menjadi salah satu identitas nasional Polandia. Begitu pula dengan perubahan sosial yang saat ini terjadi di Polandia, dimana mereka melibatkan transformasi peradaban Eropa ke dalam identitas nasional. *Return to Europe*, diangkat dari sebuah kisah sejarah peperangan, menjadi sebuah slogan politik dibalik adanya transformasi besar yang terjadi di Polandia, sebuah proses Polandia masuk ke dalam organisasi supranasional Uni Eropa. Terdapat sebuah keinginan dan keseriusan yang sangat besar untuk ikut berkontribusi dalam pusat peradaban barat. Keseriusan tersebut tercermin dalam sikap politik domestiknya yang selalu menjadikan barat sebagai referensi politiknya. Namun, kini tidak sepenuhnya mereka sejalan dengan pemikiran barat.

Dari beberapa elit politik Polandia menyatakan bahwa Polandia terancam akan kehilangan identitas negara katolik apabila tergabung

dalam persatuan Eropa atau Uni Eropa<sup>96</sup>. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan konsep antara barat yang dulu hingga sekarang. Menurutnya, Barat yang sekarang tidak lagi memenuhi kriterianya sebagai negara Katolik. Barat yang sekarang adalah barat yang liberal, atheis, tak ada hal yang sakral, dan tidak berprinsip moral<sup>97</sup>. Hal tersebutlah yang menjadi fokus Polandia sebelum memasuki organisasi supranasional Uni Eropa.

Berbicara mengenai identitas Polandia terhadap Eropa, tentunya terdapat hal-hal yang sifatnya masih kontras satu sama lain. Disini terdapat perbedaan ketika Polandia memasuki Uni Eropa dibanding negara-negara lain yang turut ikut dalam Uni Eropa. Perbedaan tersebut terletak pada kerasnya Polandia dalam mempertahankan nilai-nilai identitas nasional mereka. Dalam beberapa nilai yang dianggap kontradiktif dengan nilai identitas nasional Polandia maka Polandia akan memilih untuk mempertahankan nilai nasionalnya tersebut daripada melakukan asimilasi atau penyesuaian antara nilai yang dianut dengan nilai-nilai Eropa yang dijunjung saat ini. Bahkan, Polandia mempunyai agenda sendiri yang berbeda dengan Uni Eropa yaitu menanamkan kembali nilai-nilai terdahulu yang telah ditinggalkan di pusat Eropa<sup>98</sup>.

<sup>96</sup> Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000): 13, [www.humanityaction.org/files/278-Polish\\_National\\_Culture\\_and\\_its\\_Shifting\\_Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf).

<sup>97</sup> Ibid., 13.

<sup>98</sup> Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", 13.

Maka dapat diketahui bahwa Polandia mengakui dirinya sebagai negara barat yang memandang Eropa sebagai pusat peradaban, letak dimana sumber nilai-nilai yang baik dan patut untuk dicontoh. Seperti nilai-nilai, Kristen, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan dan lain sebagainya. Menjadikannya sebagai sebuah referensi dalam berkehidupan. Namun, Polandia tidak secara total menganut segala nilai yang ada dalam barat. Nilai-nilai yang dipertahankan sangat kuat oleh Polandia adalah nilai-nilai leluhur. Nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai agama atau dogma agama. Seiring berjalananya waktu, Eropa terus berkembang, hal-hal yang baru mulai bermunculan dan menjadi fokus para negara Eropa. Dalam hal ini Polandia melihat perubahan tersebut menuju hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai leluhur. Dimana ajaran agama Katolik tidak lagi menjadi sumber referensi dalam pembuatan keputusan dan menuju hal yang sifatnya lebih atheis<sup>99</sup>. Terlebih sejarah Roma selalu terkutip dalam politik domestik Polandia. Maka dari itu, Polandia berkeinginan untuk mempertahankan nilai tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bagaimana sejarah cukup mampu membuat identitas kristen sangatlah melekat di Polandia. Konstruksi identitas tersebut juga tidak lepas dari demografi masyarakat Polandi yang homogen baik secara etnis dan agama. Berdasar pada teori konstruktivisme, peneliti berasumsi bahwa identitas tersebutlah yang menjadi alasan mengapa Polandia tidak menerima pengungsi muslim.

99 Ibid., 14.

## B. Aksesi Uni Eropa terhadap Polandia

Sejak tanggal 1 Mei 2004, Polandia telah resmi menjadi negara anggota Uni Eropa. Masuknya Polandia ke dalam Uni Eropa bukanlah perkara yang mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang perlu dilalui melalui beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan sejarah yang dimiliki oleh Polandia termasuk perdebatan antara Barat-Timur dan transformasi Polandia dari negara komunis satelit Uni Soviet hingga menjadi negara demokrasi.<sup>100</sup>

Secara norma dan nilai, Polandia memiliki keanggotaan di Uni Eropa karena legitimasi dan akar sejaranya. Selain itu, pada waktu yang bersamaan, usaha aksesi Uni Eropa terhadap Polandia juga membantu proses transformasi Polandia dari negara sosialis menuju negara dengan sistem politik demokrasi ala barat. Oleh karena itu Polandia bergabung dengan Uni Eropa karena menganggap bahwa Uni Eropa memiliki peran untuk transformasi politiknya dan berorientasi ke-barat-an.

Jika dilihat dari kepentingan negara, keanggotan Polandia di Uni Eropa memberikan dampak yang besar pada aspek ekonomi, politik, dan militernya. Hal ini dikarenakan transformasi menuju ekonomi pasar yang bebas dan modernisasi yang mengakselerasi pertumbuhan di semua sektor ekonomi sebagaimana terjaminnya aspek perdagangan, investasi, dan ekspor tenaga kerja.

---

<sup>100</sup> Maria Karasinska, “Effects of accession on Poland,” in *Enlarging the European Union*, ed Graham Avery et al. (Brussels: Trans European Policy Studies Association, 2009), 29.

Bergabungnya Polandia ke dalam NATO semakin menjanjikan tingkat keamanan Polandia dari ancaman militer dan politik Rusia dikarenakan akses kebijakan Amerika Serikat secara langsung kepada negara anggota NATO. Sehingga dengan bergabungnya Polandia sebagai negara anggota Uni Eropa akan semakin meyakinkan negara anggota NATO yang berasal dari Eropa untuk mendukung kebutuhan keamanan Polandia secara penuh. Hal itu dikarenakan, secara geografi, Polandia yang terletak diantara Jerman dan Rusia dapat menggunakan kekuatan serta pengaruh Uni Eropa dan NATO untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Mengingat juga bahwa Polandia mendefinisikan dirinya sebagai negara yang paling penting dan berpengaruh di *Central Eastern Europe* baik di Uni Eropa dan NATO serta sebagai *promoter* kepentingan Eropa Timur.<sup>101</sup>

Dari sisi ekonomi, Polandia mendapatkan peningkatan positif pasca bergabung dengan Uni Eropa yang direfleksikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% dan meningkatnya pertumbuhan konsumsi sebesar 6% per tahun. Pengangguran di Polandia pun juga berkurang sejak bergabung dengan Uni Eropa, hanya dalam kurun waktu empat tahun (2004 – 2008), dari 20% menjadi 11,4%. Tidak hanya pengangguran, gaji rata-rata meningkat dari 537 euro menjadi 850 euro dan *Foreign Direct Investment* (FDI) juga meningkat dari 3,7 miliar euro menjadi 12,8 miliar euro. Hal tersebut berarti dalam kurun waktu

<sup>101</sup> Maria Karasinska, "Effects of accession on Poland," in *Enlarging the European Union*, ed Graham Avery et al. (Brussels: Trans European Policy Studies Association, 2009), 30.

empat tahun pengangguran di Polandia berkurang hingga setengahnya dan gaji meningkat sebesar 58%. Meningkatnya FDI juga diperkirakan menciptakan 1,2 juta pekerjaan baru.

Secara keseluruhan, keanggotaan Polandia di Uni Eropa sangat krusial bagi identitas Polandia, kepentingan ekonomi dan militernya, serta kekuatannya. Menyerahkan sebagian kebijakan terhadap Uni Eropa dianggap tidak ada apa-apanya dibanding dengan kompensasi yang didapatkan oleh Polandia sebagaimana mampu melegitimasi Polandia sebagai kekuatan besar di *Central Eastern Europe*.

### C. Pandangan Domestik Politik Polandia terhadap Nilai-Nilai Uni Eropa

Saat ini partai politik yang berkuasa di Polandia adalah *Law and Justice Party* (PiS). Sebagai partai populis dan sayap kanan, PiS banyak sekali menerima kecaman dari media-media asing karena sikapnya yang bertentangan dengan norma-norma demokrasi seperti memperlemah kebebasan sipil dan kontrol terhadap media yang berlebihan.

Meskipun mendapatkan protes dari pihak luar, PiS masih mendapatkan dukungan dan popularitas yang tinggi dari dalam negerinya. Hal itu dikarenakan pernyataan yang sangat ‘nasionalis’ yang dilontarkan oleh kadernya. Salah satunya adalah Szydlo yang menyatakan bahwa ‘berada di Uni Eropa bukan berarti menerima pemberian politik, akan

tetapi menerima tanggung jawab (untuk keselamatan warga negara kami) ketika elit politik di Brussels dibutakan oleh pemberanakan politik”<sup>102</sup>

Pandangan PiS terhadap Eropa Barat semakin diperjelas oleh pernyataan Kaczynski, Ketua PiS, yang menyatakan bahwa “Terdapat krisis di Eropa... ini adalah krisis yang serius akan kesadaran Eropa, sebuah krisis identitas, yang diikuti dengan jatuhnya nilai dan dasar institusi sosial”<sup>103</sup> Agar terhindar dari krisis identitas tersebut, Kaczynski akan tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional Polandia dan akan tetap menjaga kondisi homogen negaranya yakni Katolik dan demografi kulit putihnya. Ia menyatakan bahwa keharusan untuk mengadopsi model sosial Eropa Barat agar bisa mencapai tingkat pembangunan setara adalah omong kosong.<sup>104</sup>

Argumentasi tersebut ternyata sejalan dengan pendapat kebanyakan masyarakat Polandia. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Pew Global menunjukkan hanya 14% masyarakat Polandia setuju bahwa memiliki perbedaan ras dan kebangsaan dalam suatu negara membuat tempat tersebut menjadi tempat yang lebih baik untuk ditempati.<sup>105</sup> Hal itu berarti hanya sedikit masyarakat Polandia yang setuju

<sup>102</sup> "Why Poland's Law and Justice Party Remains So Popular," Foreign Affairs, diakses 08 Juli 2018, <https://www.foreignaffairs.com/articles/central-europe/2017-11-03/why-polands-law-and-justice-party-remains-so-popular>.

103 Ibid.

104 Ibid.

<sup>105</sup> “Europeans not convinced growing diversity is a good thing,” Pew Research Centre, diakses 08 Juli 2018, <http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-not-convincing-growing-diversity-is-a-good-thing-divided-on-what-determines-national-identity/>.

untuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang memiliki perbedaan identitas.

Dikutip dari *Foreign Affairs*, PiS mendefinisikan *a true European* atau orang-orang Eropa sesungguhnya adalah berkulit putih dan beragama Kristen dengan kepercayaan tradisional nya terhadap keluarga dan seksualitas serta memiliki kewaspadaan terhadap *non-white people* khususnya Muslim. Berdasarkan ide tersebut, Kristen dikonstruksi sebagai penanda peradaban yang membedakan Eropa dari dunia Muslim.

Ide dan pandangan seperti itu sudah sangat biasa di kalangan Polonia terlebih lagi hal ini dikarenakan ide dan pandangan seperti itu diekspresikan dengan legitimasi negara melalui pernyataan-pernyataan pemerintah. Kepopuleran PiS di Polonia juga menyebabkan ide tersebut mudah diterima oleh masyarakat, ditambah lagi karena pertumbuhan ekonomi Polonia di bawah kepemimpinan partai PiS juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi tersebut sangat jelas dapat dirasakan masyarakat Polonia karena program strategis yang dibuat oleh pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat seperti kebijakan insentif bagi orang tua yang memiliki anak-anak, peningkatan usia pension, dll. Kesejahteraan yang diterima masyarakat Polonia tersebut menjadikan mereka tidak terlalu memperhatikan telah berapa banyak nilai-nilai demokrasi yang dilanggar oleh pemerintah Polonia sebagaimana diutarakan oleh media-media asing.

**D. Inkonsistensi Polandia dan Konstruksi Ancaman dalam Merespon Krisis Pengungsi di Eropa**

Sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun 2015 telah ditetapkan adanya *European Refugee Relocation Plan* sebagai pengganti *Dublin Regulation* guna mengatasi menumpuknya pengungsi di Italia dan Yunani. Berdasarkan *European Refugee Relocation Plan*, sekitar 98.255 pengungsi yang terdapat di Italia dan Yunani akan disebar ke negara anggota Uni Eropa termasuk Polandia. Pada bulan September 2015, pemerintah Polandia mendeklarasikan untuk menerima 7082 pengungsi dari Italia dan Yunani dibawah *European Refugee Relocation Plan*.<sup>106</sup> Meskipun begitu *European Commission* mengharapkan Polandia untuk menerima 6182 pengungsi.<sup>107</sup> Pemerintah Polandia yang pada saat itu dikuasai oleh Partai PO (*Civic Platform*) dan Partai PSL (*Polish People Party*) juga berjanji untuk merelokasi 100 pengungsi ke negaranya.<sup>108</sup>

Pada bulan Oktober 2015 terdapat pemilihan umum parlemen Polandia. Pada pemilihan kali ini dimenangkan oleh partai yang lebih berideologi ‘sayap kanan’ yakni *Law and Justice Party* (PiS). Berdasarkan tulisan yang ditulis oleh Pilat dan Pokanska, deklarasi untuk menerima pengungsi tetap dipegang teguh oleh partai ini. Hal tersebut dapat dilihat dari pembuatan *makeshift camps* untuk para pengungsi yang akan datang

<sup>106</sup> Anna Pilat dan Dominika Potkanska, *Local responses to the refugee crisis in Poland* (Warsaw: Institute of Public Affairs, 2017), 6.

<sup>107</sup> Senada Selo Sabic, *The Relocation of Refugees in the European Union* (Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017), 6.

<sup>108</sup> Anna Pilat dan Dominika Potkanska, *Local responses to the refugee crisis in Poland* (Warsaw: Institute of Public Affairs, 2017), 6.

dan terdapatnya *special working group* yang dipimpin oleh *Migration Policy Unit* dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri dan Administrasi guna menangani masalah pengungsi, baik yang berasal dari *Ukrainian crisis* dan krisis pengungsi di Eropa.<sup>109</sup>

Akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama. Polandia merubah keputusannya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Polandia pada tahun 2015 ketika ia setuju terhadap skema relokasi pengungsi. Perubahan kebijakan tersebut mulai terlihat pada tahun 2016 ketika pemerintah Polandia menurunkan kuota *asylum seeker* yang akan diterimanya, yang awalnya 7082 orang menjadi 400 orang.<sup>110</sup> Hingga akhirnya terjadi serangan teroris di Brussels yang menjadikan Pemerintah Polandia tidak melakukan relokasi pengungsi sebagaimana yang mereka janjikan hingga saat ini. Polandia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang belum melakukan relokasi pengungsi bahkan satu orang pun dibawah skema *European Refugee Relocation Plan*. Mereka menjadikan serangan teroris di Brussels tersebut sebagai alasan mengapa refugee tersebut berbahaya bagi negaranya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Polandia, Beata Sydlo, yang menyatakan “*as things stand, I don't see any possibility of any migrants being accepted in Poland*”.<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Ibid., 7.

<sup>110</sup> Anna Pilat dan Dominika Potkanska, *Local responses to the refugee crisis in Poland* (Warsaw: Institute of Public Affairs, 2017), 7.

111 Ibid.

Kondisi tersebut diperparah dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Polandia, Mariusz Blaszczałk yang mengatakan pada reporter Politico bahwa “*In agreeing to take in refugees, the (previous government) put a ticking bomb under us*”. “*We’re defusing that bomb*”.<sup>112</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Polandia dibawah kepemimpinan partai PiS menyalahkan Partai PO dan PSL yang pada tahun 2015 bersedia untuk menyetujui *European Refugee Relocation Plan* ini.

Pernyataan tersebut kemudian dibalas oleh Pimpinan Civic Platform (PO), Grzegorz Schetyna, yang menyatakan bahwa dahulu yang partainya lakukan adalah menentang *illegal migrants* bukan menerima pengungsi.<sup>113</sup> Schetyna dan Mantan Perdana Menteri Ewa Kopacz, yang setuju terhadap *European Refugee Relocation Plan*, mengatakan bahwa Polandia tidak akan menerima mandate Uni Eropa yang bersifat *Top-Down* terkait alokasi pengungsi.<sup>114</sup>

Penolakan pengungsi tersebut dikarenakan kekhawatiran terhadap migran muslim yang dapat membawa masalah terhadap masyarakat Polandia yang homogen. Hal ini diperjelas oleh Kaczynski, pimpinan partai PiS, bahwa "*It is completely untrue that to achieve Western levels of*

<sup>112</sup> “Why Poland doesn’t want refugees,” Politico, diakses 8 April 2018, <https://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why-poland-doesnt-want-refugees/>.

<sup>113</sup> Ibid.

114 Ibid.

*development, we have to adopt their social models*”.<sup>115</sup> Ia menegaskan bahwa ia akan mempertahankan nilai-nilai masyarakat Polandia dan kondisi masyarakat yang homogen yaitu katolik dan demografi yang berkulit putih.

Hal tersebut sangatlah kontras dengan identitas yang dibawa oleh pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika Utara yang beragama Islam. Pembentukan opini bahwa pengungsi dengan identitasnya tersebut berbahaya dapat terlihat dari pernyataan Kaczynski bahwa “*migrants carry all sorts of parasites and protozoa, which ... while not dangerous in the organisms of these people, could be dangerous here.*”<sup>116</sup> Secara terang-terangan Kaczynski menyatakan bahwa pengungsi tersebut berbahaya dan harus dihindari dengan cara melakukan penolakan terhadap pemberlakuan relokasi pengungsi sebagaimana dimandatkan oleh Uni Eropa.

Penggambaran identitas pengungsi tersebut semakin diperparah oleh pernyataan Blaszcak, mantan Menteri Dalam Negeri Polandia, yang menyatakan bahwa, “*letting even a single refugee into the country would risk turning it into a breeding ground for terrorists. Poland must therefore*

<sup>115</sup> "Why Poland's Law and Justice Party Remains So Popular," Foreign Affairs, diakses 08 Juli 2018, <https://www.foreignaffairs.com/articles/central-europe/2017-11-03/why-polands-law-and-justice-party-remains-so-popular>.

<sup>116</sup> “Migrants carry ‘parasites and protozoa,’ warns Polish opposition leader,” Politico, diakses 08 Juli 2018, <https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/>.

*defend the continent's Christian civilization from the Islamic fighters who threaten to kill us".<sup>117</sup>*

Sebagaimana peneliti lihat dari beberapa pernyataan di atas, penggunaan diksi kata juga memberikan pengaruh terhadap bagaimana masyarakat melihat suatu isu tersebut. Hal tersebut terlihat melalui perubahan opini publik terhadap pengungsi selama dua tahun partai PiS berkuasa. Retorika anti pengungsi yang selalu didengungkan dapat merubah 75% masyarakat Polandia yang pada awalnya setuju untuk menampung pengungsi secara sementara menjadi 75% masyarakat Polandia menolak ide tersebut.<sup>118</sup> Jajak pendapat yang dilakukan oleh CBOS tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat Polandia menolak untuk hidup berdampingan bersama pengungsi.

Ketidakpatuhan Polandia tersebut membuat Uni Eropa melakukan *infringement procedures* pada tahun 2017.<sup>119</sup> Berdasarkan *EU treaties*, *European Commission* dapat menempuh jalur hukum, *infringement procedures*, terhadap negara anggota Uni Eropa yang gagal dalam mengimplementasikan hukum Uni Eropa. *European Commission* dapat mengajukan kasus tersebut kepada *European Court of Justice* untuk

<sup>117</sup> “Poland, History, And The Refugee Crisis: Warsaw’s Response Calls For A Sobering Look To The Past,” Voxeurop, diakses 08 Juli 2018, <https://voxeurop.eu/en/2017/poland-and-refugee-crisis-5121327>.

<sup>118</sup> "Stosunek do przyjmowania uchodźców", Centrum Badania Opinii Społecznej 2017, 2.

<sup>119</sup> "Europe Monthly Report," UNHCR, Februar 2018, 11.

memberikan *financial penalties* atau hukuman berupa denda terhadap negara anggota yang melanggar tersebut.<sup>120</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti melalui rekaman video perdebatan pengungsi di Parlemen Polandia<sup>121</sup> menunjukkan bahwa Partai PiS yakin kebijakan untuk tidak merelokasi pengungsi adalah hak negaranya. Bahkan ia menganggap jika Uni Eropa memaksa Polandia untuk menerima pengungsi maka itu adalah sebuah pelanggaran kedaulatan sebagaimana yang Kaczynski katakan, “*On top of that, we believe that taking such decisions without our consent.. clear consent of the nation -and such consent doesn't exist- violate the constitution. Yes... it is a violation of the constitution, a violation of the country's sovereignty and also a violation of citizenship rights*”.

Dalam pidato tersebut Kaczynski juga mengatakan bahwa pengungsi adalah ancaman yang dapat membahayakan negaranya. Pimpinan partai PiS tersebut juga yakin bahwa pengungsi tidak akan mematuhi peraturan yang ada di Polandia termasuk tradisi yang ada di Polandia. Lebih dari itu, Kaczynski berusaha menggambarkan bahwa pengungsi tersebut adalah ancaman dengan menganalogikan insiden yang terjadi di negara Eropa lain sebagaimana berikut ini:

*If anyone says that this is not true, then have a look around Europe. In Sweden, for instance, there are 54 no-go zones where*

<sup>120</sup> "Infringement Procedure," European Commission, diakses 08 Juli 2018, [https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en).

<sup>121</sup> Debate on immigration, refugees in Polish parliament. Jaroslaw Kaczynski speech 2015. [https://youtu.be/6NIRstWinSU?list=PLPgeIA3PKxvHzeoaa8lu\\_m\\_Pb5zgsVA4i](https://youtu.be/6NIRstWinSU?list=PLPgeIA3PKxvHzeoaa8lu_m_Pb5zgsVA4i)

*there is sharia law and state has no control of. Anxieties about raising a Swedish flag on schools – there is such custom – because there is a cross on that flag. Even, as it appears so, Swedish school girls can't anymore wear shorter skirts today, as this also is not accepted. What is happening in Italy? Churces are being taken over, used sometimes as toilets. What is happening in France? A neverending wrangle. Sharia law is also implemented. Street patrols that guard if sharia law is obeyed. Same thing in London.*

Berdasarkan pidato tersebut ia berusaha meyakinkan parlemen bahwa yang dilakukan Partai PiS adalah hal yang benar. Dengan tidak menerima pengungsi maka akan membuat negaranya lebih stabil dibandingkan dengan negara Eropa lain yang telah menerima pengungsi dan terbukti pengungsi tersebut membuat ulah. Kaczynski juga menjelaskan bahwa mereka tidak harus menerima pengungsi karena mereka tidak melakukan kolonialisme terhadap Afrika Utara dan Timur Tengah di masa lampau. Sehingga Polandia tidak berkewajiban untuk menerima pengungsi tersebut. Ia juga beranggapan bahwa Polandia tidak turut andil dalam terjadinya krisis di Afrika Utara dan Timur Tengah. Kaczynski menuduh kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lah yang menyebabkan konflik dan destabilisasi di Timur Tengah dan sekitarnya itu bisa terjadi, hingga memunculkan banyak sekali pengungsi.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh BBC<sup>122</sup>, Presiden Polandia, Andrzej Duda, disinggung terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh Kaczynski yang menyatakan bahwa pengungsi yang berasal dari Timur

<sup>122</sup> We're 'Euro-realists' not Eurosceptics says Polish President Andrzej Duda. BBC News. [https://www.youtube.com/watch?v=hDcxA-cahtQ&index=2&list=PLPgeIA3PKxvHzeoaa8lu\\_m\\_Pb5zgsVA4i](https://www.youtube.com/watch?v=hDcxA-cahtQ&index=2&list=PLPgeIA3PKxvHzeoaa8lu_m_Pb5zgsVA4i).

Tengah tersebut berbahaya dan sebuah ancaman. Ia kemudian mengatakan bahwa pada dasarnya Polandia ingin menyesuaikan dengan hukum Uni Eropa tetapi Polandia juga ingin mengakkan hukum negaranya sendiri. Baginya, Polandia melakukan hal tersebut karena untuk melindungi perbatasannya secara efektif. Hal tersebut membuat orang lain tidak memiliki alasan untuk mempermasalahkan hal itu. Duda juga menambahkan bahwa merupakan suatu kebanggan dan kebahagiaan bagi dirinya dan masyarakat Polandia untuk dapat bergabung dalam Uni Eropa khususnya para generasi tua. Menurutnya hal tersebut merupakan sebuah symbol yang signifikan bahwa mereka sejajar dengan negara-negara di Eropa Barat. Menurutnya hal itu dapat terjadi karena tidak terlepas dari kesamaan sejarah yang mereka miliki. Oleh karena itu ketika ditanya pandangannya terhadap Uni Eropa dia mengatakan bahwa, “*We're not Eurosceptics we are eurorealist. We want the EU to be efficient. We want it to functioned properly. We want EU to be strong and competitive.*”

Pernyataan tersebut muncul karena tidak terlepas dari respon Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa yang cenderung inkonsisten. Presiden Polandia itu pun kembali menambahkan bahwa, “*.....we can not force a solution onto ourselves that a contradictory with our tradition, culture, and a custom that we used to.*” Hal tersebut menjadi sangat jelas bahwa perbedaan identitas yang dimiliki oleh Polandia dengan para pengungsi menjadi salah satu alasan mengapa Polandia tidak bisa merelokasi pengungsi tersebut.

Jika merujuk pada perbedaan identitas yang dimiliki oleh Polandia dan para pengungsi, hal tersebut akan menuju pada perbedaan agama. Hal ini dipertegas oleh *Award-Winning Polish Film Director* yakni Krzysztof Zanussi dalam wawancara yang dilakukan oleh Russia Today<sup>123</sup>, ia menyatakan bahwa, “*I know my country is very reluctant to accept these immigrants mostly because they are Muslims and we are not having many Muslims in our history. We are very mono-ethnic at the moment that it was the result of the world war 2*”. Hal tersebut semakin memperjalas bahwa perbedaan agama menjadi salah satu alasan mengapa Polandia tidak mau menerima pengungsi.

Hal tersebut tidaklah jauh berbeda dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh CBOS pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa sebanyak 44% masyarakat Polandia memiliki persepsi negatif terhadap agama Islam, 33% memiliki sikap ambivalen terhadap Islam, dan hanya 23% masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap Islam. Persepsi negatif tersebut muncul karena tidak lepas dari kekerasan, intoleransi, perang, dan aksi terorisme yang sering diasosiasikan dengan pemeluk agama Islam.<sup>124</sup>

Faktor tersebut semakin diperkuat ketika peneliti kembali menemukan sebuah video demonstrasi yang menunjukkan bahwa para masyarakat Polandia menolak para pengungsi karena perbedaan identitas,

<sup>123</sup> Poland doesn't want refugees because they're Muslims – Polish film director. Russia Today, [https://youtu.be/nwxixui6REg?list=PLPgeIA3PKxvHzeoaa8lu\\_m\\_Pb5zgsVA4i](https://youtu.be/nwxixui6REg?list=PLPgeIA3PKxvHzeoaa8lu_m_Pb5zgsVA4i)

<sup>124</sup> Beata Roguska, *Polish Public Opinion: Attitude to Islam and Muslim*. Trans. Michał Wenzel (Warszawa: CBOS, 2015), 1.

dan salah satunya adalah agama. Pada video<sup>125</sup> tersebut terdapat gadis yang menyatakan sebagaimana berikut ini, “*This is Poland. This is our land. Our country, rules and values. Here Jesus Christ is our king. We are not interested in any European directives nor immigration quotas. These are not our wars. It is not our culture. It is not our faith and not our immigrants.*” Secara tidak langsung wanita tersebut menjelaskan bahwa Polandia adalah negara kristiani yang notabene berbeda dengan agama para pengungsi. Itulah landasan mereka untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima para pengungsi tersebut.

### E. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di sub-bab sebelumnya, peneliti akan menganalisis data menggunakan pendekatan atau teori yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Peneliti akan menggunakan konstruktivisme sebagai teori induk yang akan menjelaskan penyebab inkonsistensi Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa berdasarkan identitasnya. Secara lebih lanjut peneliti akan menjelaskan dampak *European Refugee Relocation Plan* yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap Polandia. Peneliti menggunakan konsep Eropanisasi yang dikemukakan oleh Boerzel untuk menjelaskan respon domestik Polandia terhadap transfer kebijakan tersebut serta akan menjelaskan syarat dan mekanisme berkaitan dengan respon Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa.

<sup>125</sup> Poland against Islam – Manifestation in Wroclaw, <https://youtu.be/o3VSKECLfqI>

Dalam menjelaskan proses konstruksi citra pengungsi yang dilakukan oleh elit politik Polandia, peneliti menggunakan teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan. Melalui penjelasan tersebut peneliti berusaha menekankan bahwa ketiadaan *facilitating factors* dalam menginternalisasi *European Refugee Relocation Plan* menjadi faktor pendorong yang kuat terhadap inkonsistensi respon Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa.

## **1. Relasi Identitas dan Respons Polandia dalam Kerangka Strategi Kultural**

Berdasarkan paparan data dan teori yang dijelaskan sebelumnya, peneliti berargumen bahwa ada kaitan antara identitas Polandia dengan inkonsistensi respons Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa. Inkonsistensi Polandia dapat terlihat ketika Polandia tidak kunjung melakukan relokasi satu pengungsi-pun hingga batas waktu yang ditentukan yakni bulan September 2017.<sup>126</sup>

Keyakinan akan relasi identitas dan sikap inkonsisten Polandia tersebut berdasarkan argumen Hill dan Wallace yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri yang efektif berlandaskan pada identitas nasional, kepentingan nasional, dan aspirasi masyarakat. Asumsi tersebut melekat pada sejarah dan mitos suatu negara.<sup>127</sup> Dalam menentukan identitas yang

<sup>126</sup> “EU to sue Poland, Hungary and Czechs for refusing refugee quotas,” diakses 11 April 2018, <http://www.bbc.com/news/world-europe-42270239>.

<sup>127</sup> Hill dan Wallace, "Introduction: actors and actions," dalam *The Actor's in Europe's Foreign Policy*, ed. C. Hill. (London: Routledge, 1996), 8.

dimiliki oleh Polandia, peneliti berusaha menelusuri sejarah Polandia serta nilai-nilai yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di sub-bab sebelumnya, peneliti dapat merangkum bahwa Polandia memiliki identitas sebagai berikut:

- a. Polandia mengkonstruksi dirinya sebagai pelindung Eropa, baik secara umum maupun khusus. Secara umum, jika kita melihat sejarah, Pasukan Polandia pernah berhasil dalam melindungi Eropa ketika melawan pasukan Bolshevik di Warsawa. Kemenangan Polandia dalam peperangan tersebut menggambarkan Polandia memiliki andil besar dalam melindungi Eropa atas ancaman dari Timur. Terlebih lagi pada saat itu Polandia telah mengkonstruksi Soviet sebagai negara yang primitif dan barbarian.<sup>128</sup> Secara khusus, dalam mitologi Polandia, mereka meyakini bahwa bangsanya adalah *victimhood* dan *martyrdom* atau dengan kata lain rela mati atas nama agama.<sup>129</sup> Polandia juga sering diidentikkan dengan benteng kekristenan di Eropa. Hal itu disebabkan karena Polandia mampu mengentikan invasi Kekaisaran Turki pada tahun 1630an dan membantu Kekaisaran Suci Roma untuk

<sup>128</sup> Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000): 8, [www.humanityaction.org/files/278-Polish\\_National\\_Culture\\_and\\_its\\_Shifting\\_Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf).

<sup>129</sup> Margarita Babovnikova, "The Construction of National Identity in Poland's Newspaper" (Master Thesis., Sodertorns Hogskola, 2018).

menghentikan pengepungan Vienna yang menjadi akhir ekspansi Kekaisaran Turki.<sup>130</sup>

Berdasarkan konstruksi identitas tersebut, Polandia tidak bisa menerima pengungsi untuk direlokasi ke negaranya dan Eropa pada umumnya. Polandia merasa bertanggung jawab untuk melindungi negaranya dan Eropa dari berbagai macam serangan. Hal itu sering terlihat dari berbagai macam sejarah maupun pernyataan politisi Polandia yang memperingatkan Uni Eropa atas kebijakan *European Refugee Relocation Plan* ini. Salah satunya adalah pernyataan dari Kaczynski, ia mengatakan bahwa,

"Terdapat krisis di Eropa... ini adalah krisis yang serius akan kesadaran Eropa, sebuah krisis identitas, yang diikuti dengan jatuhnya nilai dan dasar institusi sosial."<sup>131</sup>

- b. Polandia memiliki identitas yang homogen baik secara etnis dan agama. Jika dilihat dari etnis, Polandia secara mayoritas dihuni oleh etnis *Poles* yang merupakan bagian bangsa Slavia.<sup>132</sup> Agama di Polandia juga tergolong homogen yakni *Western Christianity*. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran Mieszko, pemimpin Polandia, yang di baptis pada tahun 966

<sup>130</sup> Educational Materials for International Student Tours to Holocaust Sites in Poland: History of Poland-Timeline. Diakses 2 Juli 2018 melalui <http://www.galiciajewishmuseum.org/>.

<sup>131</sup> "Why Poland's Law and Justice Party Remains So Popular," Foreign Affairs, diakses 08 Juli 2018, <https://www.foreignaffairs.com/articles/central-europe/2017-11-03/why-polands-law-and-justice-party-remains-so-popular>.

<sup>132</sup> "Ethnicity, Language, & Religion of Poland," Safari The Globe, diakses 04 Juli 2018, <http://www.safaritheculture.com/poland/culture/ethnicity-language-religion/>

hingga akhirnya diikuti oleh seluruh masyarakat Polandia.<sup>133</sup>

Perbedaan etnis dan agama antara Polandia dan para pengungsi menjadi penyebab mengapa Polandia tidak merelokasi para pengungsi yang berasal dari Afrika Utara dan Timur Tengah yang mayoritas memeluk agama Islam.

Resistensi tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Wendt yang menganggap perbedaan identitas akan mendorong suatu negara untuk menjadi *rival*.<sup>134</sup> Perbedaan identitas tersebut diperparah dengan ketidakselarasan intensi antara kedua pihak yang pernah terjadi ketika Kekaisaran Turki yang beragama Islam menyerang Eropa, sebuah wilayah Kristen bagi Polandia pada tahun 1600-an.

Cara pandang peneliti dalam melihat relasi perbedaan identitas dengan inkonsistensi Polandia didasarkan pada pernyataan Katzenstein yang menyatakan bahwa konteks kultural-institusional yang meliputi segala norma, nilai, dan prinsip yang membentuk budaya menjadi faktor determinan bagi kebijakan keamanan nasional suatu negara.<sup>135</sup> Sehingga cukup terlihat jelas bahwa perbedaan identitas yang menjadikan Polandia enggan untuk menerima pengungsi. Hal tersebut

<sup>133</sup> Lukasz Kaminski dan Maciej Korkuc, *A guide to the history of Poland* (Krakow: Instytut Pamięci Narodowej, 2016), 9.

<sup>134</sup> Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 335-339.

<sup>135</sup> Peter J. Katzenstein, ed., *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1996), ix.

diperkuat dengan argument Howel yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri, yang didefinisikan secara luas adalah pusat dari rasa identitas nasional seseorang, dan untuk memahami tujuan, peran dan nilai bangsa mereka.<sup>136</sup>

c. Polandia memiliki norma dan nilai yang tidak sepenuhnya sama dengan norma dan nilai yang dianut Uni Eropa. Hal tersebut diungkapkan oleh Mach. Menurutnya, Barat yang sekarang tidak lagi memenuhi kriterianya sebagai negara Katolik. Barat yang sekarang adalah barat yang liberal, atheis, tak ada hal yang sakral, dan tidak berprinsip moral.<sup>137</sup> Bagi Polandia jika terdapat nilai yang dianggap kontradiktif dengan nilai identitas nasional mereka maka Polandia akan memilih mempertahankan nilai nasionalnya tersebut daripada melakukan asimilasi atau penyesuaian antara nilai yang dianut nilai-nilai Eropa tersebut. Hal tersebut dipertegas oleh Kaczynski, pimpinan Partai PiS, yang menyatakan bahwa sangatlah tidak benar bahwa untuk mencapai tingkat pertumbuhan negara Barat, kita harus mengadopsi model sosialnya.<sup>138</sup>

<sup>136</sup> D. Howell, *Britannia's Business*. (Prospect, 2006), 26.

<sup>137</sup> Mach Zdzisław, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000): 13, [www.humanityaction.org/files/278-Polish\\_National\\_Culture\\_and\\_its\\_Shifting\\_Centres.pdf](http://www.humanityaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf).

<sup>138</sup> "Why Poland's Law and Justice Party Remains So Popular," Foreign Affairs, diakses 08 Juli 2018, <https://www.foreignaffairs.com/articles/central-europe/2017-11-03/why-polands-law-and-justice-party-remains-so-popular>.

Dikutip dari *Foreign Affairs*, PiS mendefinisikan *a true European* atau orang-orang Eropa sesungguhnya adalah berkulit putih dan beragama Kristen dengan kepercayaan tradisional nya terhadap keluarga dan seksualitas serta memiliki kewaspadaan terhadap *non-white people* khususnya Muslim. Berdasarkan ide tersebut, Kristen dikonstruksi sebagai penanda peradaban yang membedakan Eropa dari dunia Muslim. Sedangkan keinginan Uni Eropa untuk merelokasi pengungsi didasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan merupakan suatu nilai solidaritas untuk membantu Yunani dan Italia yang sedang kesusahan mengatasi pengungsi.<sup>139</sup>

Pada titik ini, peneliti melihat adanya perbedaan bagaimana Polandia dan Uni Eropa memberikan identitas terhadap Eropa. Kedua aktor tersebut tidak membagi identitas Eropa yang sama. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya perbedaan kepentingan dalam merespon krisis pengungsi di Eropa.

---

<sup>139</sup> “The EU in brief,” diakses 04 April 2018, [https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en)

Secara singkat, peneliti dapat mengklasifikasikan identitas tersebut sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Klasifikasi Identitas Polandia

Agama	Katolik Roma (Homogen)
Etnis	Poles (Homogen)
Mitologi	<i>Victimhood</i> dan <i>Martyrdom</i>
Sejarah	Benteng Kekristenan Eropa dari invasi muslim (Kekaisaran Turki)
Nilai terhadap Eropa	Benua Kristen dan Berkulit Putih

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat bahwa dalam membentuk kebijakan luar negerinya, Polandia menggunakan aspek kultural untuk menentukan strateginya. Sebagaimana di jelaskan oleh Jack Snyder bahwa, “*Strategic culture is the sum total of ideals, conditional emotional responses and patterns of habitual behavior that members of the national strategic community have acquired through instruction or imitation and share with each other in regards to strategy*”.<sup>140</sup> Hal ini diperkuat oleh Holsti yang menjelaskan bahwa para konstruktivist sering mengaitkan *strategic culture* dengan identitas nasional.<sup>141</sup>

<sup>140</sup> Jack Snyder (1977) dalam Moly Krasnodebska, "Europeanization of Poland's Strategic Culture: Managing the 2013/14 Ukraine Crisis," University of Cambridge.

<sup>141</sup> Holsti (1970) dalam Moly Krasnodebska, "Europeanization of Poland's Strategic Culture: Managing the 2013/14 Ukraine Crisis," University of Cambridge

2. Sekuritisasi krisis pengungsi di Eropa sebagai Pendorong Stagnasi  
Polandia dalam Mengimplementasikan *European Refugee Relocation Plan*

Peneliti berpendapat bahwa dalam keengganan Polandia untuk mengimplementasikan *European Refugee Relocation Plan* terdapat pengaruh elit politik antara Polandia dan Uni Eropa yang tidak sejalan. Hal ini menyebabkan lemahnya pembentukan identitas bersama yang berujung pada stagnasi Polandia dalam merespon krisis pengungsi di Eropa. Hal tersebut diperjelas oleh Christian Reus-Smit yang menyatakan bahwa struktur tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya upaya para aktor/tokoh untuk mewujudkannya karena agen dan struktur bersifat saling memperkuat.<sup>142</sup>

Sebagaimana kita tahu diberlakukannya *European Refugee Relocation Plan* tentunya mempengaruhi domestik negara anggota. Hal tersebut merupakan proses *Europeanization* dimana kebijakan suatu negara harus tunduk pada kebijakan Uni Eropa.<sup>143</sup> Dampak Eropanisasi terhadap kondisi domestik suatu negara berbeda-beda tergantung sebesar apa ketidak sesuaian antara Uni Eropa dan negara anggota.<sup>144</sup> Berdasarkan penjelasan peneliti sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat

<sup>142</sup> Christian Reus-Smit, "Constructivism," dalam *Theories of International Relations* 3<sup>rd</sup> edition, ed. Scott Burchill et.al. (London: Palgrave, 2005), 197.

<sup>143</sup> Tanja A. Börzel, "Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanisation in Germany and Spain. *Journal of Common Market Studies* 37 (4)", 1999, 574.

<sup>144</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 63.

ketidaksesuaian antara kebijakan di tingkat Eropa dan Polandia. Ketidaksesuaian inilah yang akan memunculkan tekanan untuk melakukan adaptasi yang akan didorong oleh *facilitating actors* yang dapat berupa elit politik maupun institusi, yang merespons tekanan untuk beradaptasi sehingga perubahan kebijakan domestik dapat terjadi.<sup>145</sup>

Dalam kasus Polandia, tidak adanya *facilitating factors* menyebabkan stagnasi dalam mengimplementasikan *European Refugee Relocation Plan* sebagai respons terhadap krisis pengungsi di Eropa. Stagnasi tersebut juga muncul akibat tingginya perbedaan yang harus diadaptasi oleh Polandia jika ingin menerima pengungsi guna memenuhi mandat dari Uni Eropa. Hal tersebut memunculkan benturan-benturan pemerintahan Uni Eropa dengan pemerintahan nasional.

Pada masalah ini, peneliti mengkategorikan *misfit* atau ketidaksesuaian antara Polandia dan Uni Eropa cukup tinggi karena ketidaksesuaian tersebut mencakup *policy misfit* dan *institutional misfit*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Boerzel, *policy misfit* lebih mengarah kepada ketidaksesuaian kebijakan antara peraturan Uni Eropa dan Polandia. Sedangkan *institutional misfit* lebih mengarah kepada ketidaksesuaian lembaga yakni Uni Eropa dan Pemerintah Polandia karena perbedaan *collective understanding*.

<sup>145</sup> Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 58.

Ketidaksesuaian *policy misfit* tersebut terlihat ketika Kaczynski, pimpinan Partai PiS, menganggap bahwa tuntutan Uni Eropa terhadap Polandia agar menerima pengungsi adalah suatu pelanggaran kedaulatan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kebijakan Uni Eropa tersebut adalah sebuah pelanggaran konstitusi dan pelanggaran hak warga negara Polandia.

Sedangkan ketidaksesuaian *institutional misfit* terjadi karena perbedaan tersebut telah menyentuh aspek kedaulatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Checkel bahwa Eropanisasi bahkan dapat mengancam pemahaman kolektif yang mendalam tentang identitas nasional ketika menyentuh norma-norma konstitutif seperti kedaulatan negara.<sup>146</sup>

Sebagaimana teori konstruktivisme menekankan *inter-subjective meanings* dan penekanan pada pentingnya norma-norma signifikansi para agen. Oleh karena itu, Peneliti menggunakan teori sekuritisasi guna melihat bagaimana dampak domestik dari *European Refugee Relocation Plan* melalui perdebatan dan *framing* yang dilakukan oleh para agen tentang pengungsi tersebut. *Collective understandings* dan *intersubjective meanings* ini lah yang akan mempengaruhi cara aktor mendefinisikan tujuannya serta menentukan manakah aksi yang rasional dan tidak.

Jika dilihat dari berbagai macam media dan rekaman wawancara, Pemerintah Polandia cenderung menolak arahan Uni Eropa dengan mem-

<sup>146</sup> Checkel dan Risse dalam Tanja A. Borzel dan Thomas Risse, "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe," dalam *The Politics of Europeanisation*, ed. Keith Featherstone et al. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 66.

*framing* atau menggambarkan pengungsi adalah sebuah ancaman. Dalam hal ini, Pemerintah Polandia telah melakukan sekuritisasi. Secara sederhana sekuritisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses konstruksi sosial untuk mendramatisasi sesuatu yang tadinya dianggap “normal” menjadi masalah “keamanan”.<sup>147</sup>

Sekuritisasi tersebut dapat dilihat dari berbagai macam pernyataan yang dilakukan oleh *securitizing actor* dalam hal ini adalah Pemerintah Polandia. Pembentukan opini bahwa pengungsi dengan identitasnya tersebut berbahaya dapat terlihat dari pernyataan Kaczynski bahwa “*migrants carry all sorts of parasites and protozoa, which ... while not dangerous in the organisms of these people, could be dangerous here.*”<sup>148</sup>

. Secara terang-terangan Kaczynski menyatakan bahwa pengungsi tersebut berbahaya dan harus dihindari dengan cara melakukan penolakan terhadap pemberlakuan relokasi pengungsi sebagaimana dimandatkan oleh Uni Eropa.

Blaszczałk, mantan Menteri Dalam Negeri Polandia, juga menyatakan bahwa pengungsi tersebut adalah teroris yang mampu mengancam peradaban Kristen di Polandia.<sup>149</sup> Kaczynski juga menganalogikan ancaman teroris tersebut dengan insiden-insiden yang

<sup>147</sup> Barry Buzan, Waever, dan Wilde, *A New Framework for Analysis* (Colorado: Lynne Rienne Publisher, 1998), 26-33.

<sup>148</sup> "Migrants carry 'parasites and protozoa,' warns Polish opposition leader," Politico, diakses 08 Juli 2018, <https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/>.

<sup>149</sup> "Poland, History, And The Refugee Crisis: Warsaw's Response Calls For A Sobering Look To The Past," Voxeurop, diakses 08 Juli 2018, <https://voxeurop.eu/en/2017/poland-and-refugee-crisis-5121327>.

terjadi di beberapa negara anggota lain seperti serangan bom di Brussel, penerapan hukum Syariah di Swedia, penggunaan gereja di Italia sebagai toilet, dll.<sup>150</sup> Penggambaran citra ancaman pada pengungsi yang dilakukan oleh elit politik Polandia tersebut ternyata disepakati oleh publik. Hal tersebut dapat terlihat dari perubahan opini publik terhadap pengungsi selama dua tahun partai PiS berkuasa. Retorika anti pengungsi yang selalu didengungkan dapat merubah 75% masyarakat Polandia yang pada awalnya setuju untuk menampung pengungsi secara sementara menjadi 75% masyarakat Polandia menolak ide tersebut. Hal itu membuat mayoritas masyarakat Polandia menolak untuk hidup berdampingan bersama pengungsi. Peneliti juga menganalisis rekaman video yang menunjukkan demonstrasi masa Polandia untuk menolak pengungsi. Pada video<sup>151</sup> tersebut terdapat gadis yang menyatakan sebagaimana berikut ini, “*This is Poland. This is our land. Our country, rules and values. Here Jesus Christ is our king. We are not interested in any European directives nor immigration quotas. These are not our wars. It is not our culture. It is not our faith and not our immigrants.*” Secara tidak langsung wanita tersebut menjelaskan bahwa Polandia merasa terancam dengan pengungsi yang beragama Islam untuk menginvasi negara berikut budayanya.

<sup>150</sup> Debate on immigration, refugees in Polish parliament. Jaroslaw Kaczynski speech 2015. [https://youtu.be/6NIRstWinSU?list=PLPgeIA3PKxvHzeoaa8lu\\_m\\_Pb5zgsVA4i](https://youtu.be/6NIRstWinSU?list=PLPgeIA3PKxvHzeoaa8lu_m_Pb5zgsVA4i)

<sup>151</sup> Poland against Islam – Manifestation in Wroclaw, <https://youtu.be/o3VSKECLfql>

Jika dapat dikaegorikan dalam sebuah tabel maka operasionalisasi teori sekuritisasi yang peneliti gunakan dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.2

Sekuritisasi dalam respons Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa

<i>Security Agenda</i>	Pengungsi yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara
<i>Securitizing Actor</i>	<p>Aktor Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andrzej Duda (Presiden Polandia).</li> <li>2. Beata Sydlo (Perdana Menteri Polandia).</li> <li>3. Jaroslaw Kaczynski (Pimpinan Partai PiS).</li> <li>4. Mariusz Blaszczak (Menteri Dalam Negeri Polandia).</li> </ol> <p>Aktor Non Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. CBOS (Centre For Public Opinion Research)</li> </ol>
<i>Speech Act</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan bahwa pengungsi sangatlah berbahaya seperti teroris, parasit, protozoa, <i>Islamic fighters</i>.</li> <li>2. Pernyataan yang menunjukkan sikap buruk pengungsi di negara Eropa Barat.</li> </ol>

	<p>3. Jajak Pendapat yang dilakukan oleh CBOS pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Polandia tidak setuju untuk menerima pengungsi yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara.</p>
<i>Referent Object</i>	Masyarakat Polandia (Khusus) Masyarakat Eropa (Umum)

Hal tersebut semakin meyakinkan peneliti bahwa proses sekuritisasi terhadap pengungsi yang berasal dari Afrika Utara dan Timur Tengah terbilang sukses karena proses sekuritisasi yang terjadi di Polandia memenuhi empat syarat yaitu:<sup>152</sup> 1) Dapat meyakinkan publik bahwa pengungsi tersebut adalah ancaman yang dibuktikan dengan perubahan opini masyarakat Polandia sebesar 75% yang tidak setuju jika Polandia merelokasi pengungsi ke negaranya; 2) Penggunaan jargon dan terminology yang tepat oleh Pemerintah Polandia sebagai *securitizing actor* didukung oleh data yang lengka dan akurat. Selain itu, proses sekuritisasi di Polandia dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagai aktor utama sehingga memiliki kemungkinan kesuksesan yang lebih besar; 3) Publik Polandia memiliki akses informasi yang memadai sehingga mudah

<sup>152</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, alternatif, dan reflektifis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 189.

menerima pesan yang disampaikan oleh *securitizing actor* hal ini kemudian dipenetrasi oleh aktor non negara seperti CBOS; 4) Konteks sosial ekonomi yang tepat di Polandia, mengingat para *securitizing actor* berusaha membenturkan identitas pengungsi dengan masyarakat Polandia yang jika dilihat dari sejarah, orang asing tersebut adalah ancaman.

Berdasarkan proses perubahan domestik yang dijelaskan oleh Boerzel, ketika sekuritisasi terhadap pengungsi berhasil, hal tersebut menjadikan tidak adanya *facilitating factors* yang mampu mendorong pemerintahan domestik dalam hal ini adalah Polandia untuk melakukan perubahan domestik atas tekanan adanya Eropanisasi, dalam hal ini yang dimaksud adalah implementasi *European Refugee Relocation Plan*.

Jika digolongkan terhadap tingkat perubahan domestik yang dikemukakan oleh Boerzel maka tekanan adaptasi yang tinggi dan ketiadaan *facilitating factors* menjadi penjelas penyebab munculnya stagnasi Polandia dalam mengimplementasikan *European Refugee Relocation Plan* yang membuatnya inkonsisten dalam merespon krisis pengungsi di Eropa.

Sehingga secara keseluruhan, alasan inkonsistensi Polandia dalam merespons krisis pengungsi di Eropa dengan tidak melakukan relokasi pengungsi ke negaranya disebabkan identitas yang dimiliki oleh Polandia. Perbedaan identitas antara Polandia dengan pengungsi menjadi hal mendasar atas penolakan tersebut. Hal itu diperparah dengan sekuritisasi

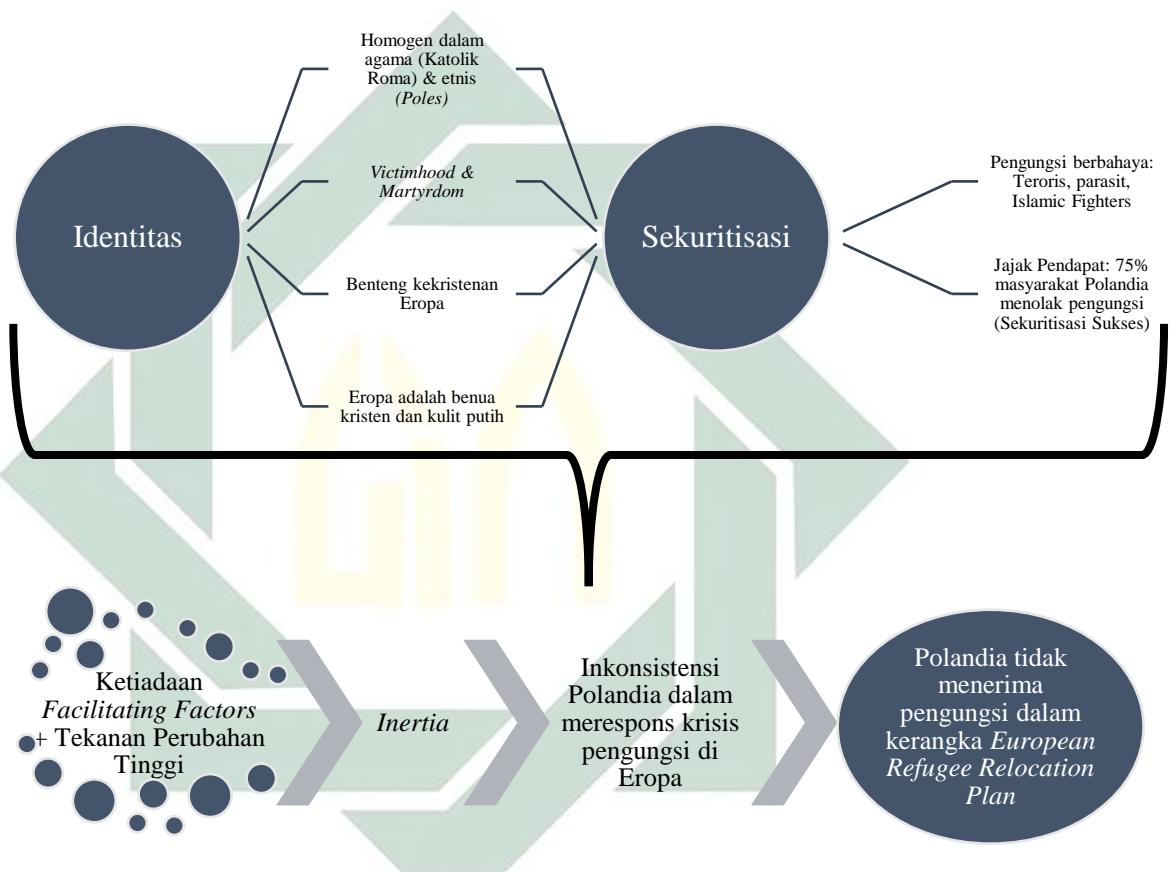
isu krisis ini oleh Pemerintah Polandia dan elit politik Partai PiS sebagai aktor negara dan aktor sekuritisasi utama yang kemudian diikuti oleh aktor-aktor non negara seperti masyarakat Polandia hingga badan jajak pendapat seperti CBOS yang mengeluarkan hasil survei mereka yang menunjukkan adanya pergeseran persepsi masyarakat terhadap pengungsi yakni sebesar 75% masyarakat Polandia menolak untuk menerima pengungsi.

Pergeseran presepsi tersebut menunjukkan kesuksesan *securitizing actor* dalam mensekuritisasi isu ini. Dalam tekanan perubahan yang tinggi, hal itu menyebabkan tidak adanya *facilitating factor* yang berusaha melakukan perubahan domestik politik Polandia terkait krisis pengungsi ini sehingga menyebabkan inkonsistensi Polandia yang ditunjukan dengan stagnasi Polandia untuk tidak mengimplementasi kebijakan *European refugee relocation plan*.

Secara ringkas hasil analisis data tersebut dapat dijelaskan melalui bagan berikut:

## Bagan 4.1

### Analisis Data



BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian dan analisis data dalam bab IV dapat disimpulkan bahwa terdapat dua alasan besar dibalik inkonsistensi Polandia terhadap krisis pengungsi di Eropa. Pertama, perbedaan identitas yang terkonstruksi antara masyarakat Polandia dengan pengungsi. Kedua, kesuksesan proses sekuritisasi isu pengungsi yang menyebabkan ketiadaan *facilitating factors* untuk mendorong terjadinya perubahan domestik. Secara sistematis, pembahasan pada bab IV mengkonfirmasi adanya konstruksi perbedaan identitas antara pengungsi dan masyarakat Polandia. Dari identitas yang terkonstruksi itu pula yang menyebabkan stagnasi Polandia dalam mengimplementasikan *European Refugee Relocation Plan* sebagai bentuk inkonsistensi Polandia dalam merespons krisis pengungsi di Eropa.

Identitas yang dimiliki Polandia tersebut kemudian dapat dikategorikan menjadi tiga diantaranya adalah: 1) Polandia mengkonstruksi dirinya sebagai pelindung Eropa, baik secara umum maupun dari segi agama; 2) Polandia memiliki identitas yang homogen baik secara etnis (Poles) dan agama (Katolik Roma); 3) Polandia memiliki norma dan nilai yang tidak sepenuhnya sama dengan norma dan nilai yang dianut oleh Uni Eropa.

Identitas tersebut kemudian digunakan sebagai “bahan mentah” para agen dalam hal ini adalah elit politik di Polandia yang mensecuritisasi isu krisis

pengungsi di Eropa. Para elit politik berusaha membenturkan identitas para pengungsi dan masyarakat Polandia. *Framing* ancaman tersebut terbukti mampu merubah opini masyarakat Polandia untuk tidak setuju dengan peraturan Uni Eropa. Dengan begitu maka tidak akan ada *facilitating factors* yang akan menekan domestik untuk mengimplementasi *European Refugee Relocation Plan*. Ketiadaan *facilitating factors* terebut diakibatkan kesuksesan elit politik Polandia dalam mensecuritisasi krisis pengungsi di Eropa dengan menyatakan bahwa pengungsi adalah ancaman yang dapat membahayakan Polandia.

Oleh sebab itu, sejak tahun 2015 diberlakukannya *European Refugee Relocation Plan* sebagai pengganti *Dublin Regulation* hingga 2017 Polandia belum sama sekali melakukan relokasi pengungsi dari Yunani maupun Italia ke negaranya.

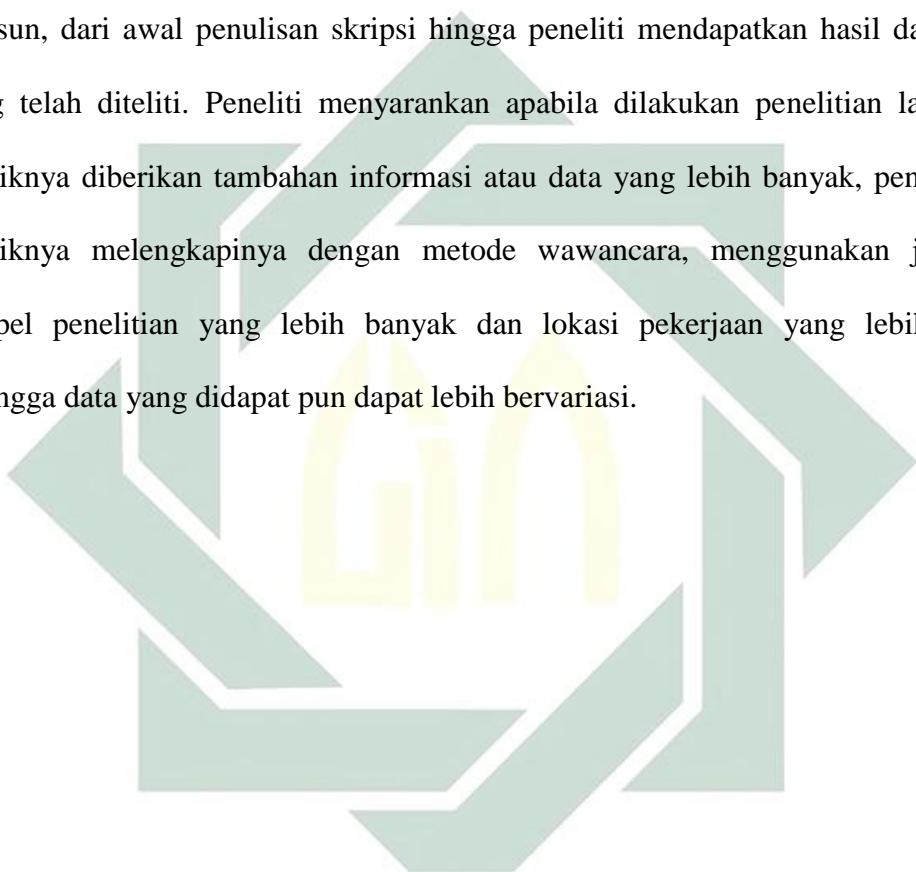
B. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah keilmuan, memperluas pemahaman, menambah wawasan, dan memberikan masukan dalam hal kerjasama keamanan maritim. Hasil Pengetahuan ini juga dapat dijadikan referensi umumnya bagi mahasiswa yang melakukan penelitian berkaitan dengan penelitian ini khususnya bagi mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional dan dapat digunakan sebagai pedoman pustaka lebih lanjut.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kebijakan atau penelitian terkait pengungsi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia sering dijadikan sebagai tempat persinggahan oleh para pengungsi

sebelum melanjutkan perjalanannya menuju negara tujuan seperti Australia. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan jika di kemudian hari terdapat permasalahan terkait pengungsi dan identitasnya di Indonesia.

Peneliti secara sadar sangat menyadari kekurangan penelitian yang telah disusun, dari awal penulisan skripsi hingga peneliti mendapatkan hasil dari apa yang telah diteliti. Peneliti menyarankan apabila dilakukan penelitian lanjutan sebaiknya diberikan tambahan informasi atau data yang lebih banyak, penelitian sebaiknya melengkapinya dengan metode wawancara, menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak dan lokasi pekerjaan yang lebih luas sehingga data yang didapat pun dapat lebih bervariasi.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku dan Jurnal

- Abdelal, Rawi. "Identity as A Variable." *Perspective on Politics* (2006): 695-706.

Börzel, Tanja A. "Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanisation in Germany and Spain. *Journal of Common Market Studies*." *Journal of Common Market Studies*, 1999.

Borzel, Tanja A., dan Thomas Risse. *Conceptualizing the Domestic Impact of Europe*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap De Wilde. *A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne rienne Publisher, 1998.

Chandler, David. "Human Security: The Dog That Didn't Bark." *Security Dialogue* 39 (2008).

Centrum Badania Opinii Spolecznej. "Stosunek do przyjmowania uchodzcow" (2017).

Clunan, Anne. *The Social Construction of Russia's Resurgence*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2009.

Davies, Norman. *Heart of Europe: The Past in Poland's Present*. New York: Oxford University Press, 1984.

El Bilad, Cecep Zakaria. "Konstruktivisme Hubungan International: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antar Paradigma." 2011: 66-81.

*Europe Monthly Report*. UNHCR, 2018.

*European Solidarity: A Refugee Relocation System*. European Commission. 2015.

*Global Trends, Force Displacement in 2015*. UNHCR. 2016.

Goetz, Klaus H., dan Simon Hix. *Europeanised Politics? European Integration and National Political Systems*. London: Frank Cass, 2000.

Hadiwinata, Bob Sugeng. *Studi dan Teori Hubungan International: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Hill, dan Wallace. "Introduction: Actors and Actions." Dalam *The Actor's in Europe's Foreign Policy*, disunting oleh C. Hill, 8. London: Routledge, 1996.

Howell, D. "Britannia' Business." *Prospect*, 2006: 26.

*Human Development Report*. UNDP, 1994.

Huysmans, Jef. *The Politics of Insecurity*. New York: Routledge, 2006.

- Janon, Maria. "Poland between The West and East." 2014: 14-21.
- Kaminski, Lukasz, dan Maciej Korkuc. *A Guide to The History of Poland*. krakow: instytut pamieci narodowej, 2016.
- Karasinska, Maria. "Effects of Accession on Poland." Dalam *Enlarging The European Union*, disunting oleh Graham Avery, 29-30. Brussels: Trans European Policy Studies Association, 2009.
- King, Gary , dan Christopher J.L Murray. "Rethinking Human Security." *Political Science Quarterly*, 2001-2002.
- Krasnodebska, Moly. "Europization of Poland's Strategic Culture: Managing The 2013/14 Ukraine Crisis." *University of Cambridge*, t.thn.
- Ladrech, R. "Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France." *Journal of Common Market Studies*, 1994: 69-88.
- Mach, Zdzislaw. "Polish National Culture and its Shifting Centres." 2000: 1-16.
- Mas'oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Oliva, Jose Angel Risco. "Regional Powers and Europeanization Processss in Spain ." 2006: 1-26.
- Olsen, Johan P. "Europeanization and Nation-State Dynamics." Dalam *The Future of The Nations*, ed. Sverker Gustavsson, disunting oleh Sverker Gustavsson, 272. New York: Routledge, 2004.
- Onuf, Nicholas Greenwood. *Making Sense, Making Worlds*. New York: Routledge, 2013.
- Onuf, Nicholas. *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. Columbia: University of South Carolina Press, 1989.
- Paris, Roland. "Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?" *International Security*, 2001: 89-429.
- Radaelli, Claudio M. "Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change",," *European Integration online Papers*, 2000.
- Roguska, Beata. "Polish Public Opinion: Attitude to Islam and Muslim." Trans. Michal Wenzel (Warszawa: CBOS, 2015).
- Sabic, Senada Selo. *The Relocation of Refugees in The European Union*. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.
- Stone, Marianne. "Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis." *Security Discussion Paper Series 1*.

Walt, Stephen M. "The Renaissance of Security Studies." *International Studies Quarterly* (Blackwell), 1991: 213.

Wendt, Alexander. "Constructing International Politics." *International Security*, 1995: 71-81.

## Internet

BBC. "EU to Sue Poland, Hungary and Czechs For Refusing Refugee Quotas." Perubahan terakhir 11 April 2018. <http://www.bbc.com/news/world-europe-42270239>.

BBC. "Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts." Perubahan terakhir 4 April 2018. <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>.

Culture PL. "Learn The History of Poland in 10 Minutes." Perubahan terakhir 8 Juli 2018. <https://culture.pl/en/article/learn-the-history-of-poland-in-10-minutes>.

DW. "The EU Migrant Relocation and Resettlement Scheme - What You Need to Know." Perubahan terakhir 4 April 2018. <https://www.dw.com/en/the-eu-migrant-relocation-and-resettlement-scheme-what-you-need-to-know/a-40378909>.

European Union. "EU Member Countries in Brief." Perubahan terakhir 4 April 2018. [https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en).

European Union. "Infringement Procedure." Perubahan terakhir 8 Juli 2018.  
[https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en).

European Union. "The EU in Brief." Perubahan terakhir 2 April 2018.  
[https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en).

Foreign Affairs. "Why Poland's Law and Justice Party Remains So Popular." Perubahan terakhir 8 Juli 2018, <https://www.foreignaffairs.com/articles/central-europe/2017-11-03/why-polands-law-and-justice-party-remains-so-popular>.

Foreign Policy. "The Arab Spring's Looming Refugee Crisis." Perubahan terakhir 26 Juni 2018. <http://foreignpolicy.com/2011/06/23/the-arab-springs-loomng-refugee-crisis>.

Galicia Jewish Museum. "Educational Materials for International Student Tours to Holocaust Sites in Poland-Timeline." Perubahan terakhir 2 Juli 2018. <http://www.galiciajewishmuseum.org>.

Global Policy Journal. "Strategic Culture and Pragmatic National Interest." Perubahan terakhir 5 April 2018. <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/22/07/2015/strategic-culture-and-pragmatic-national-interest>.

- IB Times. "European Refugee Crisis 2015: Why So Many People Are Fleeing The Middle East And North Africa." Perubahan terakhir 9 April 2018. <http://www.ibtimes.com/european-refugee-crisis-2015-why-so-many-people-are-fleeing-middle-east-north-africa-2081454>.
- Independent. "EU Plan to Relocate 160,000 Refugees From Italy and Greece by September Failing Despite Record Deaths at Sea." Perubahan terakhir 4 April 2018. <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-refugee-quotas-160000-italy-greece-failing-european-commissioner-legal-cases-obligations-a7739396.html>.
- Ministerio de Politica Territorial y Funcion Publica. "Sectorial Conferences." Perubahan terakhir 6 Juli 2018. [http://www.seat.mpr.gob.es/en/portal/areas/politica\\_autonomica/coop\\_automonica/Conf\\_Sectoriales.html](http://www.seat.mpr.gob.es/en/portal/areas/politica_autonomica/coop_automonica/Conf_Sectoriales.html).
- Oxford University. "Polskosc: The Legacy of Polish Past in its Present Identity Struggles." Perubahan terakhir 7 Juli 2018. <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/02/polskosc-legacy>.
- Pew Global. "Europeans not convinced growing diversity is a good thing, divided on what determines national identity." Perubahan terakhir 8 Juli 2018. <http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-not-convinced-growing-diversity-is-a-good-thing-divided-on-what-determines-national-identity/>
- Pilat, Anna, dan Dominika Potkanska. *Local Responses to The Refugee Crisis in Poland*. Warsaw: Institute of Public Affairs, 2017.
- Politico. "Migrants Carry 'Parasites and Protozoa,' Warns Polish Opposition Leader." Perubahan terakhir 8 Juli 2018. <https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/>.
- Politico. "Why Poland Doesn't Want Refugees." Perubahan terakhir 8 April 2018 <https://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why-poland-doesnt-want-refugees/>.
- The Balance. "The European Union, How It Works, and Its History." Perubahan terakhir 4 April 2018. <https://www.thebalance.com/what-is-the-european-union-how-it-works-and-history-3306356>.
- UNHCR. "Syria Emergency." Perubahan terakhir 9 April 2018. <http://www.unhcr.org/syria-emergency.html>.
- UN Refugees. "What is A Refugee?" Perubahan terakhir 4 April 2018. <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>
- Voxeurop. "Poland, History, and Refugee Crisis: Warsaw's response calls for a sobering look to the past." Perubahan terakhir 8 Juli 2018. <https://voxeurop.eu/en/2017/poland-and-refugee-crisis-5121327>